



RENSTRA

Rencana Strategis
2019 - 2023
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Papua menghadapi tantangan yang besar dan masalah yang semakin kompleks yang membutuhkan sumberdaya yang besar dan strategi yang mantap serta melibatkan berbagai komponen dan unsur pemangku kepentingan, sehingga perlu disusun suatu perencanaan yang baik, yang dapat membawah masyarakat Papua pada derajat kesehatan yang lebih baik.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua 2019-2023 dan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan lampirannya.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Renstra ini, semoga cita-cita dan harapan mewujudkan Masyarakat Papua yang Sehat dan Berkeadilan dapat terwujud. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita dalam mengemban tugas yang mulia ini.

Jayapura, Maret 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua



drg. ALOYSIUS GIYAI, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 197209082002121011



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	8
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua	8
2.2 Sumberdaya Dinas Kesehatan Provinsi Papua	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua	55
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	59
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI	61
3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN	78
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	126
BAB VIII P E N U T U P	129



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan penganggaran lainnya	2
Gambar 1.2	Tahapan penyusunan renstra perangkat daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua	16
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Sekolah Menegah Kejuruan Kesehatan	18
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan	19
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (BPPATM)	20
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Balai Labotatorium Kesehatan	21
Gambar 2.6	Tingkat pendidikan ASN pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua	24
Gambar 2.7	Kinerja Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua	49



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Eselon pada Dinas Kesehatan Provinsi menurut Golongan 22
Tabel 2.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi menurut Tingkat Pendidikan 22
Tabel 2.3	Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dirinci berdasarkan tingkat pendidikan 23
Tabel 2.4	Data Aset barang bergerak (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua 24
Tabel 2.5	Jumlah kematian ibu dan anak Provinsi Papua Tahun 2014-2017 26
Tabel 2.6	Jumlah puskesmas yang teregistrasi dan tersertifikasi akreditasi menurut kabupaten/kota se Provinsi Papua 27
Tabel 2.7	Jumlah dan distribusi Rumah Sakit yang tersertifikasi akreditasi di Provinsi Papua Tahun 2018 28
Tabel 2.8	Pencapaian Standar Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017 32
Tabel 2.9	Status Gizi balita umur 0-59 bulan menurut IndeksBB/U Hasil pemantauan status gizi tahun 2015-2017 34
Tabel 2.10	Distribusi satuan tugas pelayanan kesehatan kaki telanjang/jalan kaki/pelayanan terapung dan terbang (SATGAS KIJANG) Tahun 2015-2018 41
Tabel 2.11	Komponen penilaian kinerja pelayanan dinas kesehatan kabupaten/kota 50
Tabel 2.12	Trend Rapor pelayanan kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Papua Tahun 2014-2017 51
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan kesehatan 55
Tabel 3.2	Penelaahan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2019-20123 60
Tabel 3.3	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi untuk pencapaian visi, misi dan program pembangunan daerah 61
Tabel 3.4	Sasaran Pembangunan Kesehatan 2015-2019 62
Tabel 3.5	Matriks keselarasan sasaran Dinas Kesehatan 67



	Provinsi Papua dengan sasaran Kementerian Kesehatan, KLHS dan SDGs	
Tabel 3.6	Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua	68
Tabel 4.1	Indikator sasaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2020	70
Tabel 4.2	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua	74
Tabel 5.1	Strategi dan arah kebijakan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023	80
Tabel 6.1	Rencana program kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023	85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang mengacu pada indikator kinerja urusan kesehatan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	126



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sesuai Pasal 272 UU No 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

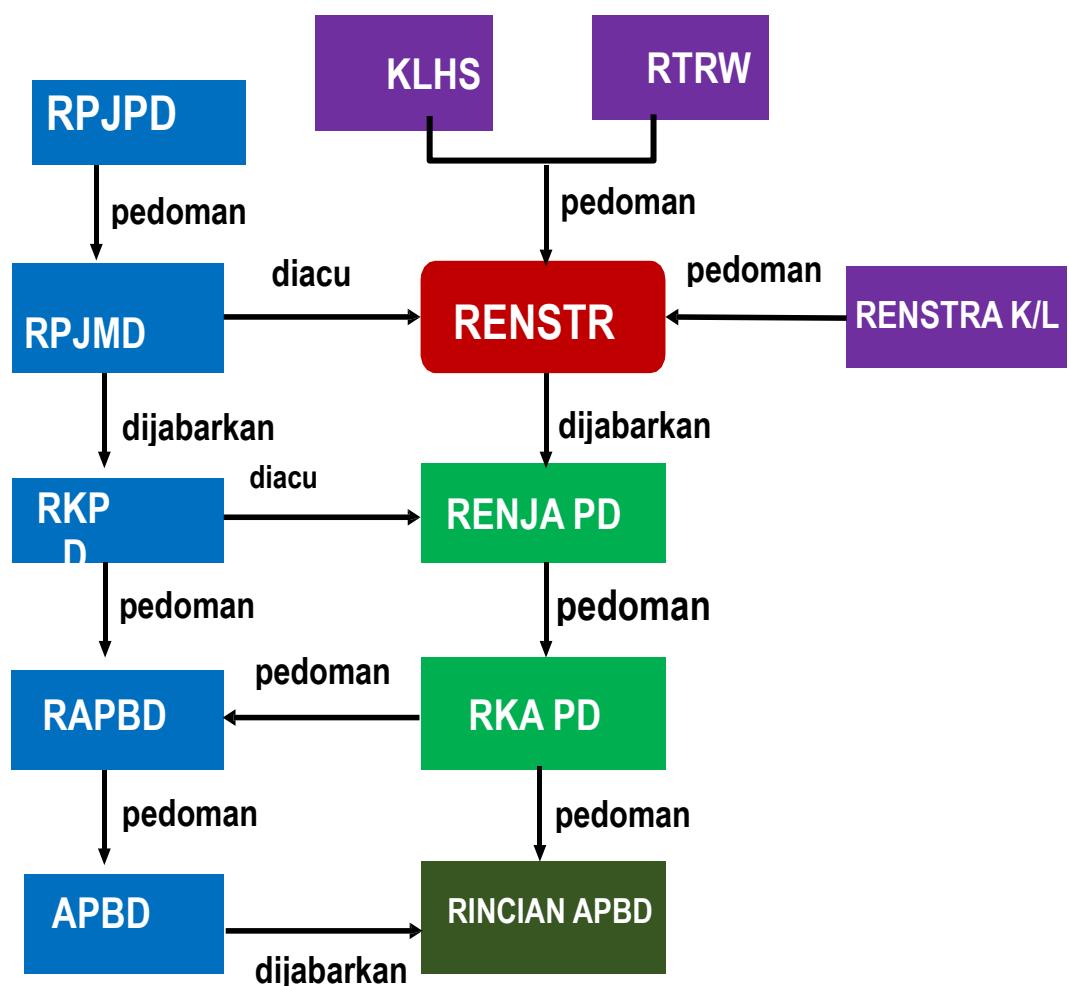
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Papua diselaraskan pencapaian sasaran program kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan, sehingga selaras dengan sasaran pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua (Perkada). Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja (Renja) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi pedoman dalam rincian APBD.

Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya seperti digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 1. 1

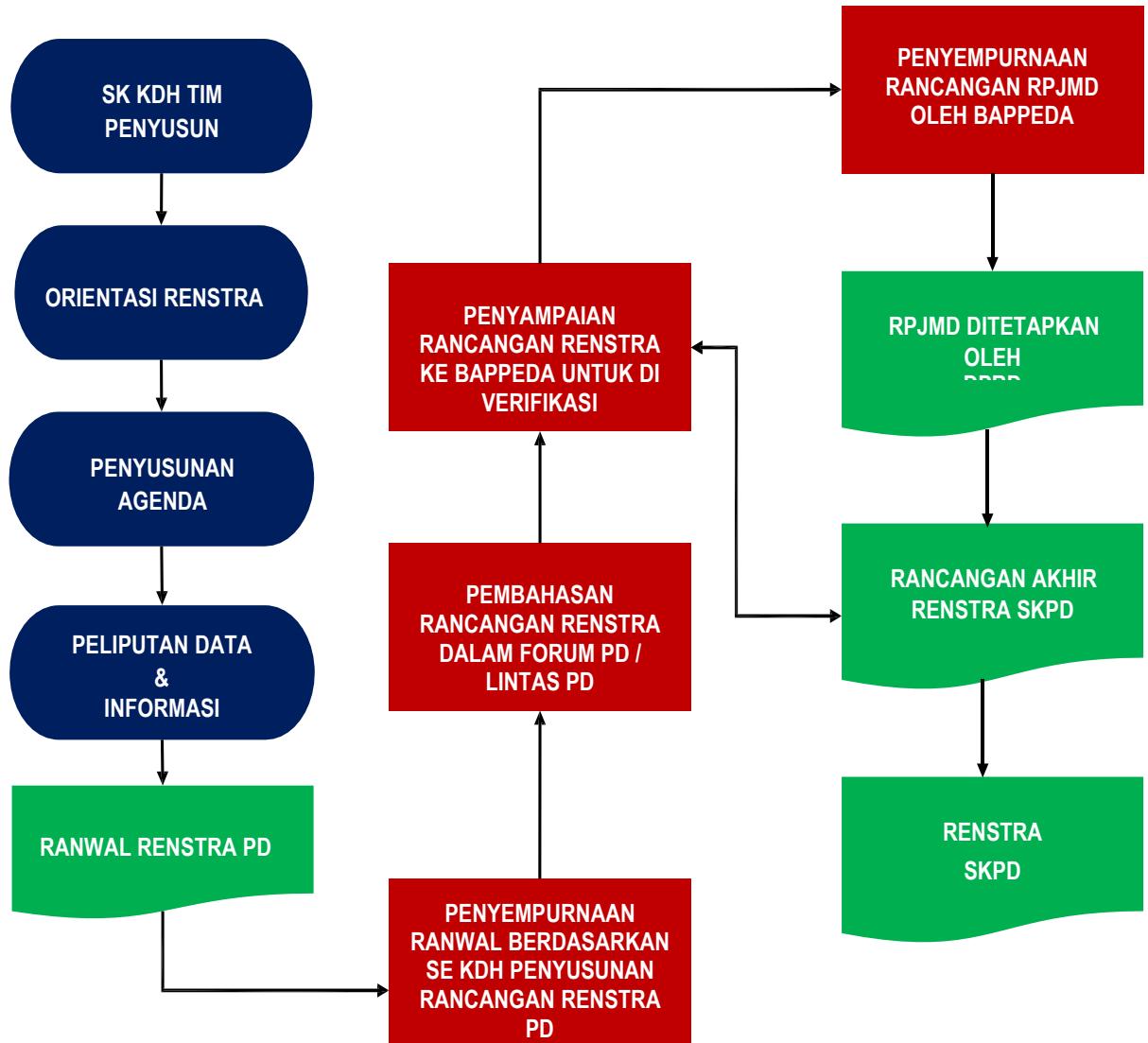
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Penganggaran lainnya



Rencana Strategis ini disusun dengan tahapan sebagai berikut; persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Tahapan penyusunan sesuai dengan bagan berikut :

Gambar 1.2.

Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai pedoman dan acuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
15. **Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor Tentang RPJMD Provinsi Papua 2019-2023**
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Meneteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. **Peraturan Daerah nomor Tahun tentang STOK**
21. **Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua**
22. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan Balai Latihan Kesehatan (Balatkes)
23. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua



Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kesehatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Kesehatan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan di Bidang Kesehatan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I . PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II . GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan;



- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi penjelasan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikator kinerjanya.
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi penjelasan rumusan pernyataan strategi dan kebijakaan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi penjelasan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi penjelasan indikator kinerja bidang kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan,
- BAB VIII PENUTUP,



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua, susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kelompok Jabatan Fungsional,

Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan pelaksana pemerintahan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan



- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan kesehatan;
- 4) Penyusunan pelaksanaan kebijakan sistem kesehatan daerah;
- 5) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan
- 6) Pengawasan, pemantauan pengendalian dan evaluasi sistem upaya dan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan
- 7) Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan pada seluruh sarana kesehatan di wilayah provinsi,
- 8) Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus



- 9) Perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas
- 10) Pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 11) Pengawasan, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelayanan rumah sakit,
- 12) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kesehatan kerja
- 13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengembangan informasi kesehatan,
- 14) Pembangunan, pengembangan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan,
- 15) Perencanaan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
- 16) Penanganan kesehatan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 17) Pemungutan, penata usahaan, penyetoran, pelaporan dan peretanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan kesehatan
- 18) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang kesehatan,
- 19) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang kesehatan,
- 20) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat perangkat daerah dibidang kesehatan,



- 21) Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan,
- 22) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas,
- 23) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas,
- 24) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kesehatan.

Uraian Tugas Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan admininstrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan;
- 2). Pengelolaan pelayanan admininstrasi umum dan perizinan;
- 3). Pengelolaan admininstrasi kepegawaian;
- 4). Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan aset dan dokumen di UPT;
- 5). Pengelolaan admininstrasi keuangan;
- 6). Pengelolaan admininstrasi perlengkapan;
- 7). Pengelolaan aset dan barang miliki negara;
- 8). Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 9). Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;



- 10). Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisial*) di bidang kepegawaian
- 11). Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT;
- 12). Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 13). Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
- 14). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, jaminan kesehatan serta penanggulangan bencana bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, dan jaminan kesehatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan ,mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan ,mutu dan akreditasi, kecelakaan



lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;

- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan ,mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;
- 5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan ,mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,



- penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menluar, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
 - 7) Bidang Bina Sumberdaya Kesehatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 9) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan
 - 10) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan



- 11) Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan
- 13) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

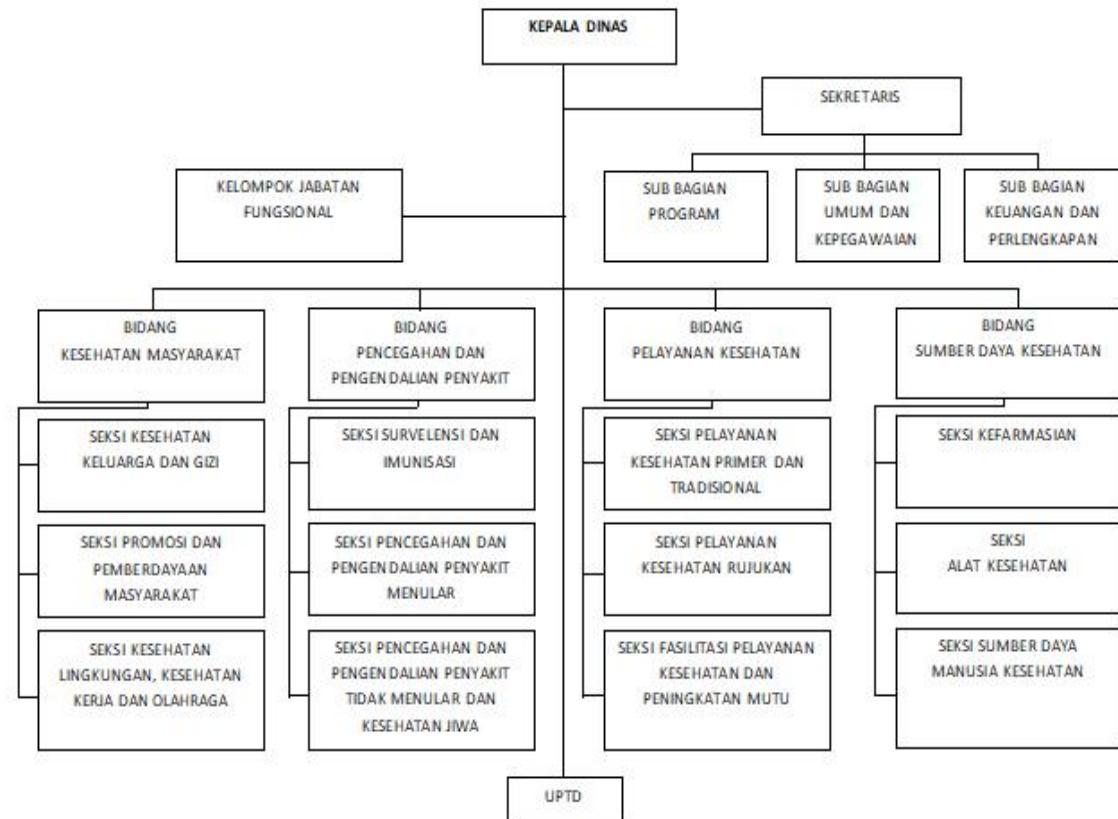


masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

- 5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagaimana bagan struktur berikut

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Paapua



Dinas Kesehatan Provinsi Papua terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari :

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, **Bidang Kesehatan Masyarakat** terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga dan



Gizi, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** terdiri dari Seksi Survelens dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. **Bidang Pelayanan Kesehatan** terdiri dari Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisionil, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu **Bidang Sumberdaya Kesehatan** terdiri dari Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT. Balai Latihan Kesehatan
2. UPT. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan
3. UPT. Balai Laboratorium Kesehatan
4. UPT. Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS,Tuberkulosa dan Malaria (ATM)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Organisasi dan Tata Kerja pada UPT UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan Balai Latihan Kesehatan (Balatkes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017. Sedangkan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017.

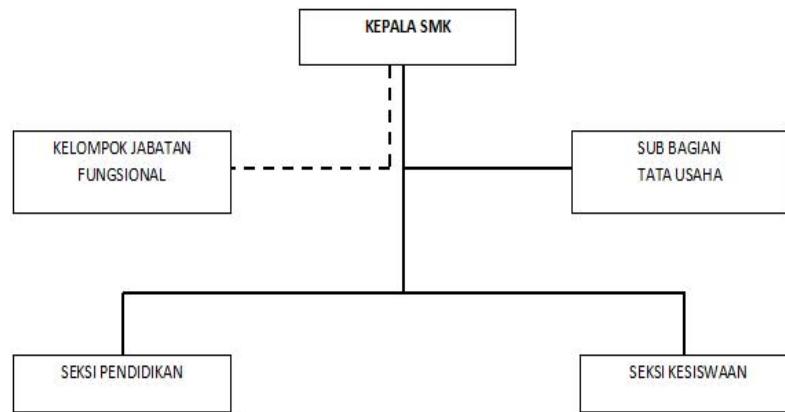
1. UPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan



Susunan organisasi terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan, Seksi Kesiswaaan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Kesehatan



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses pendidikan, belajar mengajar siswa program analisis kesehatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya SMK Kesehatan mempunyai fungsi :

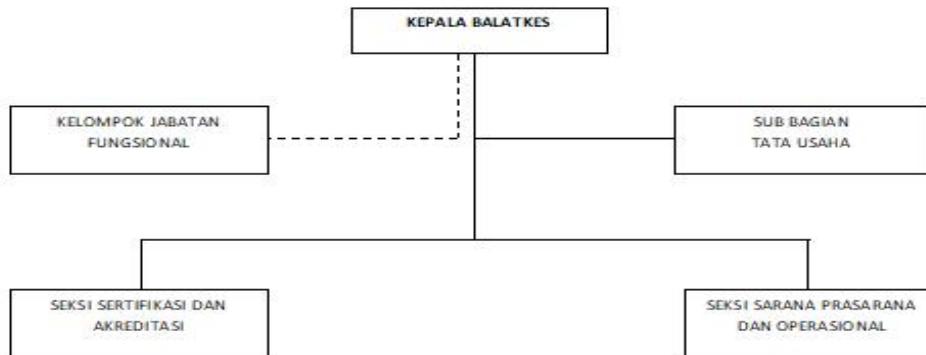
- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan belajar mengajar dan praktek sesuai kurikulum;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa;
- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dan
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

2. UPTD. Balai Latihan Tenaga Kesehatan (Balatkes)

Susunan organisasi terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Sertifikasi dan Akreditasi, Seksi Sarana Prasarana dan Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.3
Struktur Organisasi Balai Latihan Kesehatan



Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang tenaga kesehatan dan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balatkes mempunyai fungsi :

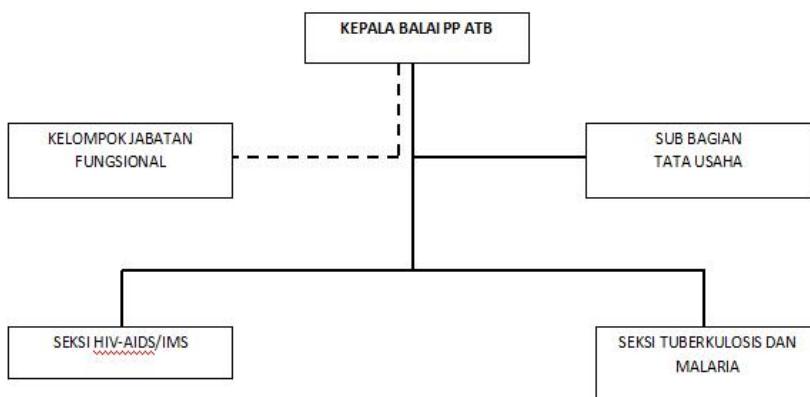
- 1) Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana latihan dan
- 4) Pengelolaan urusan ketata usahaan.

3. UPTD. Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosa dan Malaria (Balai PP ATM)

Susunan organisasi Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi HIV-ADIS/IMS, Seksi Tuberkulosa dan Malaria dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.4
Struktur Organisasi Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS
Tuberkulosa dan Malaria



UPTD. Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses penanggulangan dan pengendalian masalah AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, program kegiatan penanggulangan dan pengendalian masalah AIDS, Tuberkulosis dan Malaria serta tugas laing yang diberikan Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, TB dan Malaria mempunyai fungsi :

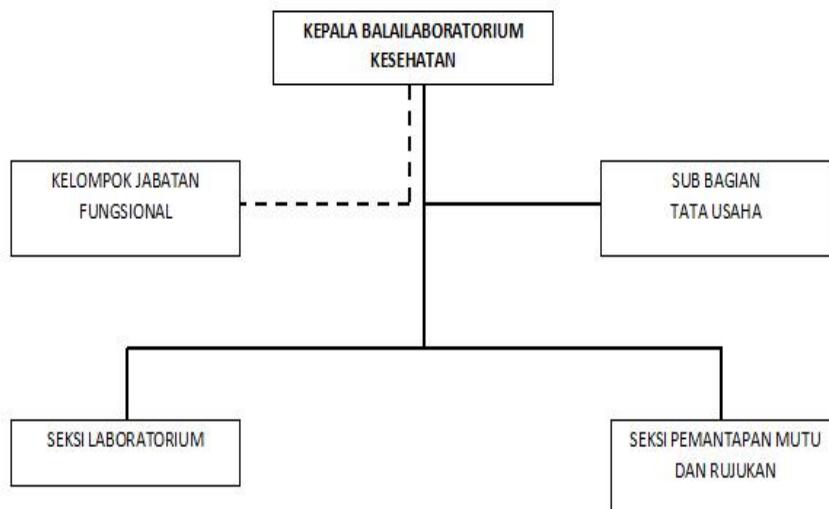
- 1) Penyelenggaraan proses penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan
- 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan teknis serta koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian
- 3) Pelaksanaan evaluasi, kebijakan dan strategi, peraturan dan standar dan program AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
- 4) Pengelolaan sarana prasarana
- 5) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

4. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah



Susunan organisasi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium, Seksi Pemantapan Mutu dan Rujukan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.5
Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan



UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang meliputi mikrobiologi dan immunologi, kimia patologi,toksikologi dan kesehatan lingkungan serta pemantapan mutu dan rujukan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan program kerja
- 2) Pelaksanaan sistem rujukan
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium
- 4) Pelaksanaan rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan dan teknologi
- 5) Pengelolaan rujukan tenaga dan sarana, dan
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan.



2.2. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Berdasarkan struktur organisasi terdapat 37 (tiga puluh tujuh) jabatan struktural (eselon) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Papua

No	Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	1	5	15	21
2	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan		1	3	4
3	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan		1	3	4
4	UPTD SMK Kesehatan		1	3	4
5	UPTD Balai PP (ATM) AIDS, Tuberkulosa, Malaria		1	3	4
	Jumlah	1	9	27	37

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2018

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua didukung oleh sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 329 orang yang dirinci menurut golongan ruang sebagai berikut , golongan I 1 orang, golongan II 74 orang, golongan III 230 orang dan golongan IV 24 orang sebagaimana disajikan pada tabel berikut,

Tabel 2.2
Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dirinci berdasarkan Unit Kerja dan Golongan Tahun 2018

No	Unit Kerja	Golongan Ruang				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	Sekretariat	1	11	55	6	73
2	Bidang Bina Yankes		10	21	3	34
3	Bidang Bina PP		8	31	1	40
4	Bidang Bina SDK		2	20	4	26



5	Bidang Bina Kesmas		4	27	2	33
6	Balai Labkes		23	23	1	47
7	Balai Latkesda		4	20	5	29
8	Balai ATM		7	16	1	24
9	SMK Kesehatan		5	17	1	23
TOTAL		1	74	230	24	329
Prosentase (%)		0.3	22.5	70	7.2	100

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Sedangkan Tingkat pendidikan ASN sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dirinci berdasarkan tingkat pendidikan per Oktober 2018

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD/SMP/ SLA sederajat	Ak/DIII	S1/DIV	S2	S3	Jumlah
1	Sekretariat	28	7	33	5	0	73
2	Bidang Bina Yankes	7	8	14	5	0	34
3	Bidang Bina PP	9	8	20	3	0	40
4	Bidang Bina SDK	2	1	20	3	0	26
5	Bidang Bina Kesmas	6	3	18	6	0	33
6	Balai Labkes	15	17	11	4	0	47
7	Balai Latkesda	5	4	10	9	1	29
8	Balai ATM	6	4	10	2	2	24
9	SMK Kesehatan	2	5	13	3	0	23
TOTAL		80	57	149	40	3	329
Prosentase (%)		24.3	17.3	45.3	12.2	0.9	100

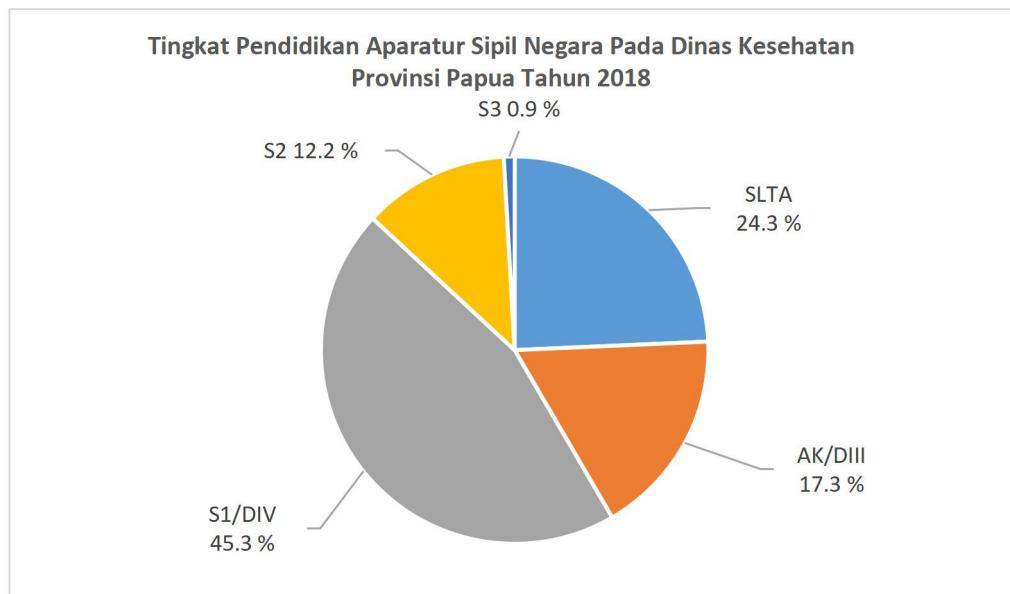
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Papua (Sumber Data BKD Provinsi Papua Thn 2018

Komposisi berdasarkan proporsi jenjang pendidikan disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 2.6

Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua



Data aset barang bergerak (kendaraan) Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data aset barang bergerak (kendaraan bermotor) pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 6	1	1	
2	Kendaraan Roda 4	41	41	
3	Kendaraan Roda 2	20	20	

Sumber : Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan Dinkes Provinsi Papua



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2014- 2018 sebagai berikut :

A. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka kematian ibu (AKI)/Maternal Mortality Rate (MMR) adalah salah satu indikator hasil pembangunan di bidang kesehatan, semakin rendah AKI maka pembangunan suatu wilayah mengindikasikan semakin baik pembangunan di bidang kesehatan. AKI secara nasional cenderung bergerak fluktuatif. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 KLH meningkat menjadi 346 per 100.000 KLH pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), namun menurun menjadi 305 per 100.000 KLH berdasarkan hasil Survei Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015, sedangkan AKI Provinsi Papua sebesar 573 per 100.000 (SDKI 2012), berdasarkan SUPAS 2015 diestimasikan AKI Provinsi Papua sebesar 216 per 100.000 KH, lebih rendah dari target RPJMD 2013-2018 yakni sebesar 250 KH. AKB nasional (SDKI 2012) sebesar 32 per 1000 KH sedangkan untuk Provinsi Papua sebesar 54 per 1000, sedangkan pada tahun 2015 AKB nasional turun menjadi 24 per 1000 KH (SUPAS 2015), untuk Provinsi Papua SUPAS 2015 tidak mengeluarkan angka. Gambaran kematian ibu dan kematian bayi di Provinsi Papua yang bersumber dari laporan rutin kabupaten/kota sebagai berikut :



Tabel 2.5

Jumlah Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Papua

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Kematian Ibu per 100.000 KLH	442	239	380	289
2	Jumlah kematian Bayi per 1.000 KLH	8	12	13	8

Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga Dinkes Prov. Papua

Data pada tabel diatas tidak menggambarkan angka kematian ibu dan kematian bayi yang sesungguhnya karena diperoleh dari laporan rutin beberapa kabupaten/kota (persentase penyampaian laporan rendah). Namun demikian dengan kemajuan pembangunan selama periode 5 tahun terakhir, sehingga dapat dinyatakan bahwa derajat kesehatan ibu dan anak telah meningkat.

B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja jumlah distrik yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas tersertifikasi akreditasi telah mencapai target yang ditentukan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 34 puskesmas di 34 distrik, dari target 10 puskesmas, hasil ini melampaui target, namun kinerja ini baru mencapai 8,6% dari 395 Puskesmas (341 distrik) masih ada 361 Puseksmas atau 92,4 % puskesmas yang belum tersertifikasi akreditasi, sehingga diharapkan pada tahun 2018-2023 seluruh puskesmas telah tersertifikasi akreditasi. Sebaran puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di Provinsi Papua sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.6

Jumlah Puskesmas yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Akreditasi Menurut Kabupaten/kota Tahun 2018

Kode Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah PKM yang harus registrasi ulang	Jumlah PKM baru yang harus Registrasi	PKM yang teregistrasi oleh Kemenkes			Status Akreditasi				
				Jumlah PKM yang Teregister ulang	Jumlah Total PKM yang Teregistrasi baru	Jumlah Total PKM yang teregistrasi	DASAR	MADYA	UTAMA	PARIPURNA	JUMLAH
9401	MERAUKE	20	5	0	0	0	3	2	0	0	5
9402	JAYAWIJAYA	13	15	0	9	9	2	0	0	0	2
9403	JAYAPURA	19	1	19	1	20	5	2	1	0	8
9404	NABIRE	26	3	3	0	3	3	0	0	0	3
9408	KEPULAUAN YAPEN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9409	BAIK NUMFOR	18	0	0	0	0	4	0	0	0	4
9410	PANIAI	18	12	0	0	0	1	0	0	0	1
9411	PUNCAK JAYA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9412	MIMIKA	13	10	1	6	7	0	2	0	0	2
9413	BOVEN DIGOEL	20	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9414	MAPPI	11	1	0	1	1	0	0	1	0	1
9415	ASMAT	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9416	YAHUKIMO	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9417	PEGUNUNGAN BINTANG	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9418	TOLIKARA	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9419	SARMI	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0
9420	KEEROM	10	0	0	0	0	1	2	0	0	2
9426	WAROPEN	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9427	SUPIORI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9428	MAMBERAMO RAYA	7	4	0	4	4	0	0	0	0	0
9429	NDUGA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9430	LANNY JAYA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9431	MAMBERAMO TENGAH	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9432	YALIMO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9433	PUNCAK	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9434	DOGIYAI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9435	INTAN JAYA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9436	DEIYAI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9471	KOTA JAYAPURA	13	1	9	1	10	0	2	0	0	2
PAPUA		395	54	32	22	54	22	10	2	0	34

Sumber : Bidang Pelayana Kesehatan Dinkes Provinsi Papua Tahun 2018



Program Upaya Kesehatan Perorangan

A. Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah) Sakit

Jumlah rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 24 rumah sakit atau 57 % dari 42 rumah sakit yang ada, masih ada 18 rumah sakit atau 43 % yang belum tersertifikasi akreditasi. Sehingga pada tahun 2018-2023 rumah sakit yang harus tersertifikasi akreditasi berjumlah 18 rumah sakit. Untuk mendukung pelaksanaan akreditasi jumlah rumah sakit yang mengupdate data Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) baru 29 rumah sakit yang dapat mengisi dan mengupdate ASPAK, atau baru mencapai 83% faktor yang mempengaruhi adalah sulitnya jaringan internet, data sarana, prasarana, peralatan RS yang tidak terupdate secara rutin di tingkat rumah sakit, petugas yang berganti-ganti dan kurangnya respon yang cepat untuk verifikasi dari Dinas Kesehatan. Jumlah dan distribusi rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Jumlah dan Distribusi Rumah Sakit yang Tersertifikasi Akreditasi di Provinsi Papua Tahun 2018

No	KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT	STATUS AKREDITASI					
		JUMLAH	BELUM TERAKREDITASI	PERDANA	MADYA	UTAMA	PARIPURNA
1	RUMAH SAKIT MILIK PROVINSI	3	1	0	1	0	1
2	RUMAH SAKIT MILIK KABUPATEN/KOTA	25	10	10	1	3	1
3	RUMAH SAKIT MILIK TNI	5	2	1	0	1	1



4	RUMAH SAKIT MILIK POLRI	1	0	1	0	0	0
5	RUMAH SAKIT MILIK SWASTA/ YAYASAN	8	5	1	0	1	1
	JUMLAH	42	18	13	2	5	4

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Papua

B. Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS).

Jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang menerima manfaat dari Kartu Papua Sehat sejak tahun 2014 sampai 2018 jumlahnya fluktuatif yakni pada tahun 2014 sebanyak 1.471.896 orang, tahun 2015 sebanyak 1.053.020 orang, tahun 2016 sebanyak 1.381.391 orang dan tahun 2017 sebanyak 552.335 orang dan tahun 2018 sebanyak 971.050 orang. Sekitar 70 % OAP telah menerima manfaat Kartu Papua Sehat (OAP berdasarkan SP 2010 sebanyak 2.121.436 orang).

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan di Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura adalah pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 4 tahun (2014-2017) pemeriksaan laboratorium klinik meningkat dari tahun ketahun berturut, pada tahun 2014 sebanyak 57.346 spesimen , tahun 2015 sebanyak 64.163 spesimen, tahun 2016 sebanyak 72.913 spesimen dan tahun 2017 sebanyak 73.393 spesimen dengan kisaran kenaikan dari 94%-151%, demikian juga dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat meningkat berturut-turut, tahun 2014 sebanyak 6.535 specimen, tahun 2015 sebanyak 7.814 specimen tahun 2016 sebanyak 13.049 specimen dan tahun 2017



sebanyak 15.104 sepcimen, dengan capaian kinerja berkisar 120%-220%. Sedangkan pendapatan penerimaan asli daerah (PAD) berturut-turut, tahun 2014 sebesar Rp. 298.059.000, tahun 2015 sebesar Rp. 263.990.000, tahun 2016 sebesar Rp. 300.511.000 dan tahun 2017 sebanyak Rp. 309.761.000 dengan target sebesar Rp. 250.000.000 setiap tahun. Capaian kinerja melebihi target sebesar 106%-124%. Bila dibandingkan dengan anggaran yang dikelola relatif konstan tidak ada peningkatan yang signifikan bahkan bila dikaitkan dengan inflasi, anggaran yang tersedia berkurang.

Selain melakukan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua juga melakukan Pengawasan Mutu Pemeriksaan Laboratorium yaitu Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME). Pencapaian jumlah fasnyankes yang melakukan PME tuberkulosis, HIV, dan malaria pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berhasil mencapai target dengan rasio lebih dari 100 % sedangkan pada tahun 2017 tidak mencapai target dengan rasio 36 - 41 %.

Program Pengembangan Obat Asli Daerah

Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional sampai tahun 2017 sebanyak 7 puskesmas (70%) dari target sebanyak 10 puskesmas. demikian juga jumlah puskesmas yang menyelenggarakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional, ramuan dan ketrampilan sebanyak 7 puskesmas (70%) dari target 10 puskesmas. Capaian kinerja program berkorelasi dengan anggaran dan realisasi yakni berkisar 70%.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan



Kinerja pelayanan kesehatan keluarga dan gizi secara keseluruhan dari 14 (empat belas) indikator kinerja 8 indikator yang masih rendah pencapaiannya pada tahun 2018, pelayanan antenatal K4 63 %, penanganan komplikasi maternal 38 %, pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN1) 69 %, penanganan komplikasi pada neonatal 50%, puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan remaja 75%, Ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah 71 %, Bayi umur < 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 60%, Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah 85%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota, dari tiga indikator SPM yaitu Pelayanan Antenatal (K4), Pelayanan Persalinan (PF) dan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN1) masih jauh dibawah standar dengan disparitas yang cukup besar antara wilayah pesisir dengan pegunungan.



Tabel 2.9

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Menurut Kabupaten /Kota Tahun 2014-2017

NO	KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN INDIKATOR SPM											
		Pelayanan Antenatal (K4)				Pelayanan Persalinan (PF)				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN1)			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	Provinsi....	48	24	38	45	20	26	39	45	44	31	49	51
1	MERAUKE	82.0	31.0	45.93	60.8	39.4	37	43.19	62.1	73	39.3	80.90	63.1
2	JAYAWIJAYA	18.0	43.4	24.24	51.1	22.7	57	57.35	88.6	48	10.9	60.62	93.0
3	JAYAPURA	102.0	43.4	54.49	49.2	33.6	61	74.71	72.2	122	67.5	89.13	84.9
4	NABIRE	98.0	28.2	50.57	59.1	36.7	41	78.01	73.0	129	69.8	86.04	84.4
5	YAPEN WAROPEN	40.5	32.3	75.32	64.1	22.0	32	75.11	61.0	52	46.9	111.80	63.3
6	BAIK NUMFOR	84.5	15.1	42.10	39.2	29.0	2	77.97	52.3	30	21.6	102.23	60.4
7	PANIAI	13.0	22.7	72.17	39.3	7.3	5	4.95	37.2	10	16.5	23.28	41.9
8	PUNCAK JAYA	14.0	9.7	9.69	38.6	7.3	0	6.65	40.7	3	1.5	5.80	42.1
9	MIMIKA	84.0	29.6	29.60	62.9	28.3	20	19.51	38.7	52	36.6	25.07	52.4
10	BOVEN DIGOEL	65.0	33.7	39.70	39.2	28.1	33	43.13	57.5	76	34.1	62.38	59.5
11	MAPPI	0.0	12.9	32.39	39.8	0.0	38	93.97	67.3	-	27.0	97.63	74.7
12	ASMAT	72.7	18.0	53.54	21.3	28.3	13	39.37	23.3	42	8.4	41.66	24.7
13	YAHUKIMO	5.0	2.0	3.01	4.2	5.0	7	11.61	21.5	16	0.0	16.00	24.9
14	PEGUNUNGAN BINTANG	12.5	16.0	16.00	42.5	10.0	9	8.52	25.1	20	13.6	6.95	24.2
15	TOLIKARA	8.6	6.3	6.32	47.5	3.7	3	2.61	4.6	3	4.5	3.41	5.2
16	SARMI	60.4	31.8	73.06	46.2	30.0	31	71.19	43.6	84	54.0	99.49	59.9
17	KEEROM	75.3	43.6	45.80	82.3	30.0	58	57.79	83.7	75	63.3	65.01	75.9
18	WAROPEN	32.2	20.1	27.18	21.6	18.3	5	25.59	20.4	26	34.0	19.66	26.9
19	SUPIORI	78.1	25.4	36.48	47.5	28.3	11	46.42	37.4	84	26.8	20.97	41.9
20	MAMBERAMO RAYA	19.5	15.7	15.70	17.6	7.7	2	24.07	10.4	14	6.8	24.96	14.6
21	NDUGA	9.9	3.9	3.86	27.4	3.3	0	0.47	40.4	-	0.0	19.21	45.1
22	LANNY JAYA	38.6	24.2	35.86	22.7	20.7	7	8.79	24.2	17	5.9	24.04	25.9
23	MAMBERAMO TENGAH	53.5	-	27.05	30.8	22.7	7	19.74	34.5	81	0.3	21.23	36.7
24	YALIMO	23.7	20.2	20.24	27.0	0.0	20	20.15	24.5	-	19.4	13.36	35.0
25	PUNCAK	5.3	5.0	9.93	18.4	2.7	-	2.47	5.8	11	1.4	3.26	6.6
26	DOGIYAI	58.2	13.2	13.24	51.4	21.0	3	2.67	6.8	4	5.6	0.00	12.8
27	INTAN JAYA	65.8	29.0	29.01	20.9	20.0	-	3.57	26.9	12	2.3	17.32	18.8
28	DEIYAI	38.6	0.7	0.66	14.9	10.7	-	0.00	4.8	21	2.4	2.12	
29	KOTA JAYAPURA	74.8	20.1	85.42	83.9	26.0	32	82.79	73.5	82	75.9	87.67	76.2



Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016-2017 status gizi balita umur 0-59 bulan menurut indeks BB/U gizi buruk dan kurang pada tahun 2016 sebesar 15,1 % meningkat menjadi 19,8 % pada Tahun 2017, sedangkan untuk baduta (bawah dua tahun) pada tahun 2016 sebesar 14,7% meningkat menjadi 18,3 pada tahun 2017. sedangkan apabila dibandingkan antar kabupaten/kota maka beberapa kabupaten yang cukup tinggi diatas 20 % yaitu Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Paniai, Mimika, Sarmi, Waropen, Supiori, Dogiyai dan Kota Jayapura (lihat tabel 2.10)

Untuk prevalensi kasus stunting (balita pendek dan sangat pendek) gizi balita umur 0-59 bulan menurut indeks BB/U, pada tahun 2015 sebesar 28,6%, tahun 2016 sebesar 28,0% dan tahun 2017 meningkat menjadi 33,0%. antara kabupaten/kota rata-rata diatas 20% kecuali Kabupaten Merauke pada tahun 2016 sebesar 14,2% dan tahun 2017 sebesar 17,7%, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.10



Tabel 2.10

Status Gizi Balita umur 0-59 Bulan menurut indeks BB/U Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017

Kode Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Percentase												
		gizi buruk		gizi kurang		gizi baik		gizi lebih		Gizi Buruk+		Sangat pendek+pendek		
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2015	2016	2017
9401	MERAUKE	1.2	.7	7.4	7.1	89.6	91.8	1.8	.4	8.6	7.8	23.1	14.2	17.7
9402	JAYAWIJAYA	1.0	6.1	9.1	13.3	88.6	78.0	1.3	2.6	10.1	19.4	30.7	31.3	38.9
9403	JAYAPURA	4.8	3.8	10.2	19.7	83.0	75.4	2.0	1.1	15.0	23.5	16.4	22.4	27.9
9404	NABIRE	4.4	3.5	11.1	17.9	83.3	77.4	1.1	1.2	15.6	21.4	22.9	28.9	35.1
9408	KEPULAUAN YAPEN	3.6	10.6	24.4	21.9	69.9	65.8	2.2	1.7	27.9	32.5	33.9	31.0	41.9
9409	BAIK NUMFOR	5.5	8.3	16.5	15.7	76.8	74.9	1.2	1.1	21.9	24.0	28.5	26.4	34.2
9410	PANIAI	0.3	8.0	21.4	14.2	76.3	74.3	2.0	3.5	21.7	22.3	26.9	39.1	42.3
9411	PUNCAK JAYA	1.3	3.9	4.3	8.3	92.2	84.6	2.2	3.3	5.6	12.2		21.6	27.8
9412	MIMIKA	8.2	5.8	12.4	12.5	77.6	79.3	1.8	2.4	20.6	18.2	27.5	29.4	32.2
9413	BOVEN DIGOEL	3.1	4.6	9.0	14.9	86.2	77.8	1.7	2.7	12.1	19.4	25.9	33.1	31.8
9414	MAPPI	2.5	8.4	7.5	11.2	88.8	78.0	1.2	2.4	10.0	19.6	34.5	21.6	31.3
9415	ASMAT	4.1	14.3	12.4	16.0	82.4	66.1	1.1	3.6	16.5	30.3	22.5	24.1	25.9
9416	YAHUKIMO	0.9	7.4	4.9	13.2	93.6	78.5	0.6	.9	5.8	20.5		13.6	34.4
9417	PEGUNUNGAN BINTANG	0.0	13.0	9.4	15.6	89.7	68.2	0.9	3.2	9.4	28.6		26.3	39.3
9418	TOLIKARA	0.3	9.9	6.8	10.2	87.5	76.0	5.4	3.8	7.1	20.2	38.1	29.4	41.0
9419	SARMI	5.6	8.4	15.6	16.1	77.9	74.0	0.9	1.5	21.2	24.5	22.9	26.5	35.6
9420	KEEROM	3.8	4.3	14.4	14.2	79.7	80.3	2.1	1.3	18.2	18.5	21.6	25.0	26.6
9426	WAROPEN	7.3	7.1	27.4	19.5	64.0	69.2	1.3	4.2	34.7	26.6	31.4	40.6	28.2
9427	SUPIORI	8.3	9.3	16.0	17.2	75.1	71.6	0.6	1.9	24.4	26.5	39.4	33.5	38.1
9428	MAMBERAMO RAYA	1.8	7.6	13.3	15.2	82.8	74.8	2.1	2.4	15.1	22.8		23.1	29.0
9429	NDUGA	0.6	4.8	2.2	8.7	90.0	81.6	7.2	4.8	2.8	13.5		15.2	37.8
9430	LANNY JAYA	1.8	5.1	9.5	6.6	85.8	76.9	2.9	11.4	11.3	11.7	29.6	37.2	28.6
9431	MAMBERAMO TENGAH	0.0	3.3	5.8	7.6	93.6	86.3	0.6	2.7	5.8	10.9	33.2	33.8	26.0
9432	YALIMO	3.5	4.0	9.6	8.1	86.2	85.4	0.6	2.5	13.2	12.1	35.5	29.9	33.2
9433	PUNCAK	0.6	3.6	5.3	6.9	90.0	88.1	4.1	1.3	5.9	10.6	33.6	20.0	29.8
9434	DOGIYAI	4.7	12.4	21.8	13.4	72.9	69.9	0.6	4.4	26.5	25.8	38.6	51.8	43.9
9435	INTAN JAYA	8.1	9.5	7.1	16.5	84.8	71.4	0.0	2.6	15.2	26.0	23.7	24.5	45.5
9436	DEIYAI	0.3	8.5	7.5	12.3	90.0	78.1	2.3	1.2	7.8	20.8	35.6	23.8	37.8
9471	KOTA JAYAPURA	3.5	6.5	15.7	12.5	78.3	79.5	2.4	1.4	19.3	19.0	27.9	32.3	31.6
PAPUA		3.2	6.8	11.9	13.0	83.0	77.7	1.8	2.5	15.1	19.8	28.6	28.0	33.0



Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan secara keseluruhan dari 6 indikator kinerja hanya indikator desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 % untuk kesehatan tercapai dari target 40 % pada tahun 2017 menjadi 73 % pada 2017. Pencapaian terendah pada indikator Perilaku Hidup Sehat (PHBS) tahun 2017 sebesar 10 % masih jauh dari target pada tahun 2018 yaitu sebesar 80 %.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pencapaian kinerja Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga masih rendah, dari 7 indikator kinerja Kesehatan Lingkungan (2017), 4 indikator belum tercapai yaitu, pengawasan air bersih 38 %, Kampung Stop Buang Air Sembarang (SBS) 47 %, kampung yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) 60 %, dan Rumah Sakit yang melaksanakan Pengolahan Limbah sesuai standar 80%. Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat (KKS) 3 Kabupaten/Kota. Pencapaian ini masih jauh dari target nasional.

Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pembentukan Pos UKK) di Papua sampai dengan Septemeber 2018 baru terbentuk 39 buah Pos UKK yang tersebar di 9 kabupaten/kota yang menaungi berbagai kelompok pekerja informal seperti nelayan tradisional, buruh dsb. Idealnya setiap minimal 10 pekerja informal terakomodir dalam kelompok pekerja informal dilayani di 1 (satu) Pos UKK. Namun sampai sejauh ini



upaya pengembangan masih terkendala pada kebijakan & pembiayaan.

Kesehatan Olahraga (Pembinaan Kebugaran Jasmani), sampai September 2018 baru 7 Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan upaya pembinaan kebugaran anak sekolah serta 4 kabupaten yang menyelenggarakan pembinaan kebugaran bagi calon Jemaah haji .

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Surveilans Penyakit Menular

Indikator Surveilans Penyakit Menular, penanganan kejadian luar biasa (KLB) < 24 jam, setiap tahunnya realisasinya sudah mencapai 100% ini menandakan bahwa setiap KLB sudah ditangani dalam kurun waktu < 24 jam. Terdapat kesenjangan Persentase Respon Penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini KLB dan Kelengkapan Laporan SKDR untuk mencegah terjadinya KLB di Kab/Kota artinya respon kabupaten/kota masih kurang dalam kegiatan ini. Sementara Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE) diakhir tahun renstra 2018 hanya 2 kabupaten yang dapat melaksanakan kegiatan ini.

Imunisasi

Dari 4 indikator imunisasi dalam renstra (2014-2018) capaiannya sebagai berikut :

- a. Desa UCI mencapai 50%, artinya hanya 50% Kampung di Provinsi Papua yang memiliki bayi dengan imunisasi lengkap,



menjadi perhatian bahwa masih terdapat 50% Kampung dengan bayi tanpa imunisasi lengkap.

- b. Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DTP-HB Hib Lanjutan masih rendah kurang yaitu 60% tahun 2017 dan 11% tahun 2018.
- c. Imunisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) telah mencapai target sebesar 95 %
- d. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Kabupaten/Kota mencapai 80% IDL.

Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit DBD

Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Kasus DBD < 49 per 100.000 penduduk tercapai 100% artinya kabupaten/kota endemis mampu menurunkan Kasus DBD menjadi < 49 per 100.000 penduduk, Angka Bebas Jentik 95% tercapai 100 % artinya Angka Bebas Jentik Kabupaten/Kota yang endemis penyakit DBD yang sudah ditentukan tiap tahun dalam renstra telah tercapai.

Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Filaria atau Penyakit Kaki Gajah

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria dalam menurunkan Angka Mikro Filaria menjadi < 1% tercapai 100 % artinya semua Kabupaten endemis filaria di Provinsi Papua yang ditargetkan dalam 5 tahun Renstra yaitu sebanyak 23 Kabupaten berhasil menurunkan angka MF < 1%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 443/12875/SET Tanggal 20 Oktober 2016 agar Kabupaten/Kota Endemis Filariasis menganggarkan dalam DPA APBD (Otsus Bidang Kesehatan)



Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sampai dengan akhir periode renstra hanya 3 kabupaten/kota yang mempunyai peraturan bupati/walikota atau perda tentang KTR. Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan IVA sampai dengan saat ini hanya 6 Pukesmas yang melaksanakan pemeriksaan IVA dari 395 Puskesmas yang ada di Provinsi Papua Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) hanya 6 Kabupaten/kota dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Kesehatan Jiwa

Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa, hanya 8 Puskesmas atau 4 % dari 395 puskesmas yang ada di Provinsi Papua.

Penyakit Hepatitis

Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Sosialisasi dan Advokasi Deteksi Dini Hepatitis B dan C, pada akhir tahun 2018 baru 12 Kabupaten/Kota. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis pada kelompok yang paling beresiko 9 kabupaten/kota atau 31% dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SKD KLB Hepatitis A dan E, baru 12 Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan ini.

Penyakit Diare

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan layanan Dehidrasi Oral Aktif (LROA) 11 kabupaten/kota atau 41% dari 29



Kabupaten/kota di Provinsi Papua. Persentase kabupaten/kota yang melakukan Sosialisasi Typhoid ke Anak Sekolah 1 kabupaten atau 3% dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Penyakit Kecacingan

Jumlah kabupaten/kota endemis yang melaksanakan penemuan kasus Taeniasis/Cystisercosis/ Neurocystisercosis dilaksanakan di 29 kabupaten/kota.

Penyakit Kusta

Angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 3.3 per 10.000 penduduk, telah menurun dari 5,5 per 10.000 pada tahun 2014, walaupun belum mencapai target yakni 2 per 10.000 pada tahun 2018. Kabupaten/Kota dalam menurunkan angka cacat kusta dari kasus baru yang ditemukan walaupun secara kumulatif baru 14 Kabupaten yang sudah mampu menurunkan.

Penyakit Frambusia

Angka prevalensi penyakit frambusia per 10.000 penduduk dan terdapat peningkatan angka kesakitan penyakit frambusia setiap tahunnya dalam 5 tahun, pada tahun 2014 prevalensi frambusia 22 per 10.000 penduduk menjadi 50 per 10.000 penduduk pada 2018..

Penyakit Pneumonia

Persentase kabupaten/kota melaksanakan penemuan kasus dan tatalaksana pneumonia sesuai standar 22 kabupaten/kota atau 76% dari 29 kabupaten/kota.



Penyakit Malaria

Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 penduduk 46.79 pada tahun 2017, telah menurun dari 55 pada tahun 2014, namun masih belum mencapai target yakni 45 pada tahun 2018. Persentase Konfirmasi laboratorium dan Pengobatan Malaria dengan ACT 100%, artinya semua suspek malaria ditegakkan dengan Laboratorium atau RDT serta semua yang sakit malaria diobati dengan obat yang sesuai standar. Menurunkan kasus malaria dilihat dari slide Positif Rate (SPR) yang ditargetkan dapat menurun sampai dengan 11 % pada tahun 2017 ternyata masih tetap tinggi sebesar 39.69 % dari 38 % pada tahun 2014.

Penyakit HIV/AIDS

Penemuan kasus baru HIV dan Penderita AIDS pada tahun 2018 berjumlah 37.991 kasus meningkat bila dibandingkan pada tahun 2014 yakni 16.050 kasus, penemuan kasus lebih tinggi dari target yakni 25.000 kasus. ODHA yang mendapatkan ARV pada tahun 2018 sebesar 59.3 %, lebih rendah dari target sebesar 80%, namun meningkat dari 48.8 % pada tahun 2014. Tujuan Pengendalian HIV AIDS yaitu mencapai Three Zeroes 2030 ada Strategi yang harus dicapai yaitu Strategi Fast Track 90-90-90.

Penyakit Tuberkulosis (TBC)

Penemuan kasus baru BTA +(CDR) pada tahun 2017 sebesar 32.3% menurun bila dibandingkan dengan penemuan pada tahun 2014 yakni sebesar 45%, target pada tahun 2017 penemuan kasus baru BTA+(CDR) 70%, sehingga kinerja penemuan kasus baru BTA+ hanya 45%.



Program Sumberdaya Kesehatan

Sumberdaya Manusia Kesehatan

Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata merupakan masalah yang mengakibatkan rendahnya pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan terisolir. Sehingga hal ini menjadi fokus pembangunan kesehatan pada tahun 2014-2018 melalui kegiatan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan Kaki Telanjang/Jalan Kaki, Pelayanan Terapung dan Terbang (SATGAS KIJANG). Sejak tahun 2015-2018 direkrut sebanyak 479 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, kesehatan masyarakat, perawat, bidan, gizi, dan sanitarian melalui penugasan SATGAS KIJANG di 18 Kabupaten sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10

Distribusi Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan
Kaki Telanjang/Jalan Kaki, Pelayanan Terapung dan Terbang
(SATGAS KIJANG) Tahun 2015-2018

NO	KABUPATEN		NAMA DISTRIK	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH TIM	JUMLAH PERSONIL	TOTAL PERSONIL
1	Tahun 2015						
	1	Deyai	Bowobado	Bowobado	1	7	
	2	Paniai	Dumadama	Dumadama	1	7	
	3	Intan Jaya	Biandoga	Biandoga	1	7	
			Agisiga	Agisiga	1	7	
	4	Nduga	Mbua	Mbua	1	6	
			Jigi	Jigi	1	7	
	5	Tolikara	Kanggime	Kanggime	1	7	
			Wunim	Wunim	1	7	
	6	Yalimo	Welarek	Welarek	1	7	
	7	Mamberamo Tengah	Eragayam	Eragayam	1	7	
	8	Yahukimo	Anggruk	Anggruk	1	7	
	9	Pegunungan Bintang	Eipomek	Eipomek	1	7	83
2	Tahun 2016						
	1	Deyai	Kokobaya	Bowobado	1	6	
			Wagomani	Wagomani	1	7	



	2	Paniai	Mobile		1	7
	3	Intan Jaya	Mobile		1	6
	4	Nduga	Mbuia	Mbuia	1	7
			Wosak	Wosak	1	6
	5	Tolikara	Namunage	Namunage	1	6
	6	Yalimo	Landikma	Landikma	1	6
			Apahapsili	Apahapsili	1	6
	7	Mamberamo Tengah	Taria	Megambilis	1	6
	8	Yahukimo	Anggruk	Anggruk	1	6
			Ninia	Ninia	1	6
			Silimo	Silimo	1	6
	9	Pegunungan Bintang	Eipomek	Eipomek	1	6
	10	Lanny Jaya	Poga	Poga	1	7
			Pirime	Pirime	1	6
	11	Puncak Jaya	Mobile		1	7
	12	Waropen	Mobile		1	6
	13	Jayapura	Airu	Airu	1	6
	14	Nabire	Siriwo	Siriwo	1	6
	15	Asmat	Mumugu	Mumugu	1	6
	16	Dogiyai	Modio	Modio	1	6
			Puweta	Puweta	1	7
	17	Mamberamo Raya	Kustra	Kustra	1	6
	18	Jayawijaya	Itlay Hisage	Itlay Hisage	1	6
			Bolakme	Bolakme	1	6
	3	Tahun 2017				
	1	Yalimo	Benawa	Benawa	1	6
			Abenaho	Abenaho	1	6
	2	Deyai	Gakokebo	Gakokebo	1	6
			Tenedagi	Tenedagi	1	6
	3	Dogiyai	Pueta	Pueta	1	6
			Denemani	Denemani	1	6
	4	Yahukimo	Seredala	Seredala	1	6
			Kosarek	Kosarek	1	6
	5	Tolikara	Kuari	Kuari	1	6
			Namunage	Namunage	1	6
	6	Mamberamo Raya	Giesa Baru	Giesa Baru	1	6
			Poiwai	Poiwai	1	6
	7	Mamberamo Tengah	Taria	Megambilis	1	6
			Kelila	Kelila	1	6
	8	Waropen	Inggerus	Inggerus	1	6
			Soyoi Mambai	Soyoi Mambai	1	6
	9	Nduga	Mugi	Mugi	1	6



			Gearek	Gearek	1	6	
	10	Puncak Jaya	Mewoluk	Mewoluk	1	6	
			Fawi	Fawi	1	6	
4	Tahun 2018						120
	1	Asmat			2	10	
	2	Puncak Jaya	Fawi	Fawi	1	6	
			Tingginambut	Tingginambut	1	6	
	3	Yahukimo	Silimo	Silimo	1	6	
			Seredala	Seredala	1	6	
	4	Deyai	Tenedagi	Tenedagi	1	6	
			Ayate	Ayate	1	6	
	5	Dogiyai	Puweta	Puweta	1	6	
			Denemani	Denemani	1	6	
	6	Pegunungan Bintang	Eipomek	Eipomek	1	6	
			Okpahit	Kiwirok	1	6	
	7	Mamberamo Raya	Poiwai	Poiwai	1	6	
			Papasena	Papasena	1	6	
	8	Mamberamo Tengah	Taria	Megambilis	1	6	
	9	Nduga	Gearek	Gearek	1	7	
			Jigi	Jigi	1	6	
	10	Yalimo	Abenaho	Abenaho	1	6	
			Benawa	Benawa	1	7	114

Sumber : Bidang Sumberdaya Kesehatan

Untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional sesuai kebutuhan selama tahun 2014-2018 dilaksanakan kerjasama dengan 14 organisasi profesi. Sampai dengan tahun 2018 jumlah tenaga kesehatan yang telah teregistrasi sebanyak 300 orang dari berbagai profesi.

Alat Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan alat kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 terhadap 43 Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) tentang peningkatan kemampuan SDM dalam distribusi Alat Kesehatan (Alkes) yang baik dan kepatuhan distribusi Alkes yang baik (CDAKB). Kegiatan ini sangat diperlukan untuk melindungi



masyarakat dari bahaya penggunaan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, termasuk yang akan digunakan juga sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan PON tahun 2020 di Provinsi Papua.

Obat dan Perbekalan Farmasi

Puskesmas mempunyai ketersediaan obat dan vaksin esensial tahun 2017 sebesar 84,42% masih dibawah target sebesar 100%, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Pengelolaan Obat & Vaksin sesuai standar pada tahun 2017 sebesar 72.42% masih ada 8 kabupaten atau 27,6% yang memenuhi standar. Instalasi Farmasi Provinsi / Kabupaten / Kota yang menerapkan aplikasi obat dan bahan habis pakai secara elektronik, tahun 2017 baru 9 atau 30 % Instalasi farmasi yang menerapkan.

Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 2018 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan yang semula bernama Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) telah meluluskan orang yang sebagian besar adalah putra-putri Papua. Lulusan SMK Kesehatan merupakan tenaga Laboratorium yang diperuntukkan mengisi kebutuhan tenaga laboratorium di Puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di Provinsi Papua. Lulusan SMK Kesehatan Jayapura periode 2014-2018 berjumlah 419 orang. Jumlah siswa pada tahun 2018 sebanyak 544 orang dan direncanakan penerimaan siswa baru setiap tahun sebanyak 100 orang.



Balai Latihan Kesehatan

Capaian Kegiatan 2014-2018

a. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan

Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan ini berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan pelatihan yaitu adanya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pelaksanaan pelatihan Keluarga Sehat (40 angkatan @ 30 orang) dan Konsep Perubahan Perilaku (1 angkatan @ 30 orang) dan Jabatan fungsional Administrasi Kesehatan (1 angkatan @ 30 orang) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan tetapi belum disertai dengan Evaluasi Paska Pelatihan.

b. Peningkatan pengembangan diklat kesehatan

Dalam rangka melaksanakan pengembangan diklat kesehatan, Balatkes Provinsi Papua mengembangkan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan. Selain itu, disusun dan dikembangkan kurikulum dan modul yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Balatkes Provinsi Papua juga mengembangkan metode dan teknologi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Peningkatan pengembangan diklat kesehatan ini belum optimal karena belum dilaksanakan secara optimal di Balatkes Provinsi Papua.

c. Peningkatan Pengendalian Mutu Pelatihan



Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian mutu pelatihan, Balatkes Provinsi Papua mengembangkan program akreditasi dan sertifikasi baik untuk pelatihan maupun untuk institusinya. Selain itu, untuk memonitor atau mengevaluasi mutu lulusan, Balatkes Provinsi Papua melaksanakan evaluasi pasca pelatihan. Pelaksanaan Evaluasi paska pelatihan dilakukan setiap akhir pelaksanaan pelatihan tetapi belum secara luas di lapangan.

d. Peningkatan kapasitas institusi pelatihan

Peningkatan kapasitas institusi pelatihan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu SDM penyelenggara pelatihan, sarana dan prasarana serta pelayanan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peningkatan mutu SDM penyelenggara pelatihan dilakukan melalui pelaksanaan TOT, MOT, penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan teknologi. Perlu peningkatan penyediaan teknologi yang lebih luas mengingat makin berkembangnya pelaksanaan pelatihan.

Grand strategi Balatkes Provinsi Papua :

1. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur, tenaga kesehatan dan masyarakat

Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan ini berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan pelatihan yaitu adanya peningkatan proses pembelajaran, pengkajian dan pengembangan pelatihan serta pengendalian mutu pelatihan.

2. Peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan adalah dengan cara kerja sama dengan pihak bank secara online untuk pembayaran dana pendidikan. Pelatihan pengelola keuangan untuk menjadi tenaga satuan pengawas internal (SPI).

3. Pengembangan SDM sesuai kebutuhan.

Tenaga pendidikan dan kependidikan ditingkatkan kuantitasnya dengan cara pengangkatan pegawai baru dan peningkatan kualitas melalui tugas belajar/izin belajar ke jenjang yang lebih tinggi serta mengikutsertakan SDM dalam pelatihan, bench marking, workshop atau short course.

4. Peningkatan Pelayanan Penunjang Pelatihan

Pelayanan penunjang pelatihan terdiri dari pelayanan akomodasi, konsumsi, komunikasi dan informasi serta pelayanan penunjang pelatihan yang lain seperti ibadah, hiburan dan olah raga bagi peserta pelatihan / pelanggan.

5. Pengembangan unit-unit bisnis

Potensi yang dimiliki Balatkes Provinsi Papua saat ini memungkinkan untuk dikembangkan menjadi unit bisnis, seperti auditorium, bus, laboratorium, klinik terpadu, bengkel kerja (pengembangan teknologi tepat guna) dan teknologi informasi.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Latihan Kesehatan Provinsi Papua merupakan fokus dalam pembangunan tahun 2014-2018, rehabilitasi gedung kantor, pembangunan auditorium dan pengadaan



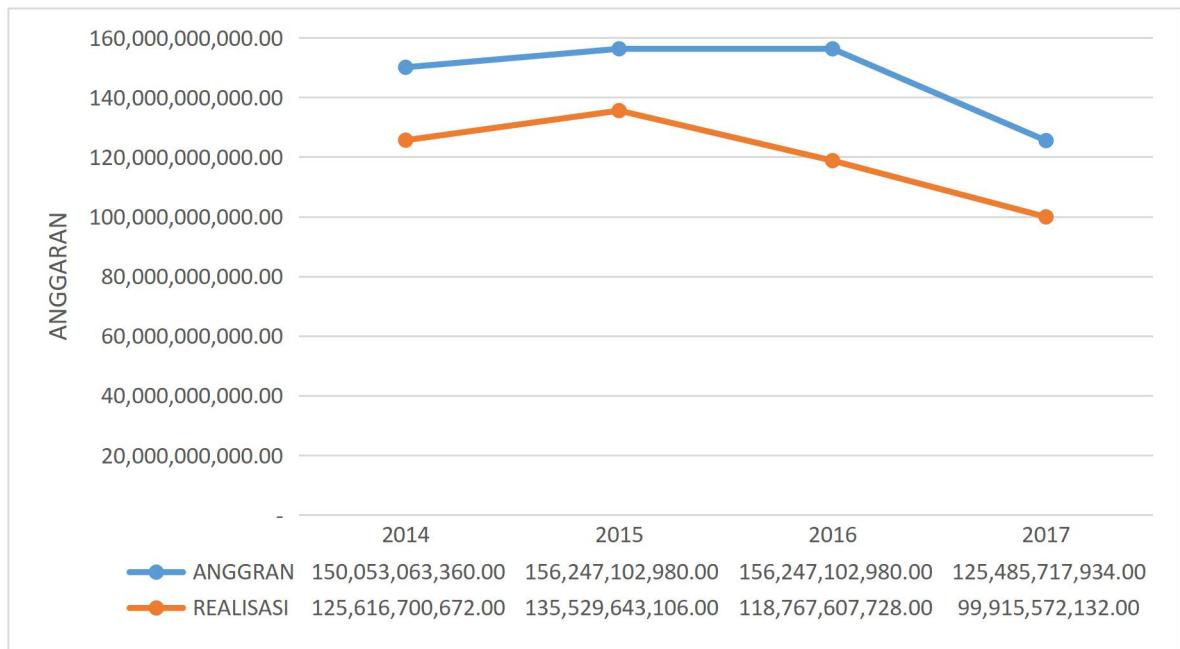
meubeler serta reakreditasi, Pembangunan dan rehabilitasi dapat direlaisasikan 100%, sedangkan kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2017 adalah pelatihan master of trainer (MOT) sebanyak 30 orang dan pelatihan widyswara (di luar Papua) sejak tahun 2015-2017 sebanyak 11 orang. Penyediaan Sarana dan prasarana masih diperlukan untuk mewujudkan nilai akreditasi serta untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olah Raga (PON) ke 20 pada tahun 2020.

Kinerja Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Rata-rata pertumbuhan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua selama tahun 2014-2017 sebesar -1.3%, mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan sebesar 1.3%, sementara realisasi sebesar -6.8%, juga mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan sebesar 6.8%. Kinerja anggaran seharusnya berkorelasi dengan kinerja program. Namun kenyataannya tidak demikian hal ini dapat terjadi oleh karena perhitungan target yang kurang rasional, atau kegiatan yang direncanakan tidak menyasar indikator sehingga antara target dan anggaran tidak berkorelasi kuat. Tren anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2.7
Kinerja Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua



Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota

Penilaian kinerja pelayanan kesehatan kabupaten/kota dilakukan selama 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, penilaian berdasarkan cakupan program dan laporan yang masuk di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, adapun komponen yang dinilai :



Tabel 2.11

Komponen Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

KOMPONEN PENILAIAN RAPOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

NO	BIDANG	KEGIATAN	KOMPONEN YANG DINILAI	PENILAIANNYA
1	Sekretariat Dinkes	Data dan Informasi Kesehatan	1 Keterisian Data Set Prioritas Aplikasi Komdat, meliputi : Rata-rata Keterisian Data Bulanan, Rata-rata KeterisianTri Wulan, dan Skor	Persentase Keterisian laporan dan Skor (Makin besar nilai, makin baik)
2	Bidang Kesehatan Masyarakat	Program Kesehatan Keluarga	1 Pelayanan Bumil K4 2 Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan (PF) 3 Pelayanan Kunjungan Neonatus (KN1) 4 Puskesmas Pelaksana Kelas Ibu Hamil 5 Puskesmas Pelaksana Orientasi P4K 6 Puskesmas Pelaksana Penjaringan Kesehatan Anak Kelas 1 7 Puskesmas Pelaksana Penjaringan Kesehatan Anak Kelas 7 dan 10 8 Puskesmas Pelaksana Penjaringan Kesehatan Anak Kelas 1, 7 dan 10 9 Puskesmas Pelaksana Kesehatan Remaja	Persentase Cakupan
		Program Gizi	1 Bumil Dapat 90 Tablet Fe 2 Bumil KEK yang mendapat PMT 3 Bayi Baru Lahir mendapat IMD 4 Pemberian ASI Eksklusif 5 Balita Kurus yang mendapat PMT 6 Remaja putri mendapat tablet Fe	Persentase Cakupan
		Kesehatan Lingkungan	1 Cakupan Kampung yang dipicu SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) 2 Kampung yang Diverifikasi SBS	Persentase Cakupan
		Promosi Kesehatan	1 Posyandu Aktif 2 Kampung dengan Dana Desa untuk UKBM	Persentase Cakupan

Hasil penilaian kinerja sebagaimana disajikan dalam matriks berikut :



Tabel. 2.12

Trend Rapor Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2014 - 2017

NO	WIL ADAT	WILAYAH	KABUPATEN	RAPOR TAHUNAN			
				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Mamta	Pesisir	Kota Jayapura	2	2	2	1
2	Mamta	Pesisir	Jayapura	1	1	1	2
3	Saireri	Pesisir	Kep. Yapen	10	15	9	3
4	Haa Anim	Pesisir	Mappi	9	4	3	4
5	Haa Anim	Pesisir	Merauke	3	5	3	5
6	Mee Pago	Pesisir	Nabire	8	7	8	6
7	Haa Anim	Pesisir	Boven Digoel	6	9	15	7
8	Mamta	Pesisir	Keerom	4	3	6	8
9	Mee Pago	Pesisir	Mimika	5	8	5	9
10	Saireri	Pesisir	Biak Numfor	7	6	10	10
11	Saireri	Pesisir	Supiori	12	11	14	14
12	Haa Anim	Pesisir	Asmat	16	14	18	16
13	Mamta	Pesisir	Sarmi	11	10	12	20
14	Saireri	Pesisir	Waropen	21	20	17	21
15	Mamta	Pesisir	Mamberamo	14	21	22	22
1	La Pago	Pegunungan	Jayawijaya	13	16	7	11
2	La Pago	Pegunungan	Lanny Jaya	26	18	11	12
3	Mee Pago	Pegunungan	Paniai	17	11	16	13
4	La Pago	Pegunungan	Pegunungan	18	29	26	14
5	La Pago	Pegunungan	Mambramo	24	19	19	17
6	La Pago	Pegunungan	Yalimo	19	13	13	17
7	La Pago	Pegunungan	Puncak Jaya	22	25	23	19
8	La Pago	Pegunungan	Puncak	28	27	21	22
9	La Pago	Pegunungan	Tolikara	19	17	20	24
10	Mee Pago	Pegunungan	Dogiyai	22	26	27	25
11	Mee Pago	Pegunungan	Intan Jaya	14	22	24	26
12	Mee Pago	Pegunungan	Deiyai	27	24	24	27
13	La Pago	Pegunungan	Nduga	29	28	28	28
14	La Pago	Pegunungan	Yahukimo	25	23	29	29

Keterangan :



1		= Kab/Kota rangking 1 s/d 3
2		= Kab/Kota rangking 4 s/d 6
3		= Kab/Kota rangking 7 s/d 10
4		= Kab/Kota rangking 11 s/d 14
5		= Kab/Kota rangking 15 s/d 17
6		= Kab/Kota rangking 18 s/d 20
7		= Kab/Kota rangking 21 s/d 23
8		= Kab/Kota rangking 24 s/d 26
9		= Kab/Kota rangking 27 s/d 29

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan 5 tahun kedepan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengenalan terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dapat memaksimal faktor pendorong dan meminimalkan faktor penghambat. Faktor internal dan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Faktor Internal, berupa kekuatan dan kelemahan yaitu :

Kekuatan

1. Adanya SOTK yang jelas
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Adanya sumberdaya manusia yang kompeten
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan kerja yang kondusif.
5. Adanya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi aparatur

Kelemahan

1. Disiplin aparatur rendah
2. Distribusi staf belum optimal



3. Pemahaman tugas dan fungsi oleh aparatur belum optimal
4. Motivasi kerja aparatur rendah
5. Manajemen kinerja belum optimal
6. Koordinasi antar unit belum optimal

Faktor eksternal, berupa peluang dan tantangan yaitu :

Peluang

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung urusan Kesehatan
2. Dana OTSUS Kesehatan 15%
3. Adanya Jaminan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua (OAP)
4. Adanya kesepakatan Global (SDGs)
5. Adanya dukungan stakeholders/ mitra/NGOs terhadap pelaksanaan urusan kesehatan
6. Sasaran pembangunan bidang kesehatan sejalan dengan sasaran pembangunan Kementerian Kesehatan

Tantangan

1. Pendidikan masih rendah
2. Angka kemiskinan relatif tinggi dan pengangguran cukup tinggi
3. Pecandu minuman keras relatif tinggi dan penggunaan narkotika/zat aditif cenderung meningkat.
4. Wilayah kerja yang luas
5. Persebaran penduduk tidak merata/ tersebar dalam kelompok-kelompok kecil.
6. Kondisi dan karakteristik geografis yang ekstrim
7. Transportasi yang sulit, terbatas dan mahal dan sistem terintegrasi



8. Akses infomasi yang rendah, penyebaran masih terbatas, keterbukaan infomasi masih kurang.
9. Kualitas lingkungan hidup semakin menurun, penanganan limbah, sampah dan polutan belum optimal, intensitas bencana cenderung meningkat.
10. Pelintas batas tradisional cenderung meningkat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Merujuk pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	1. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan yang memenuhi standar.2. Rendahnya akses pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan3. Belum optimalnya sistem rujukan4. Belum terpenuhinya standar mutu pelayanan labatorium dan terbatasnya fungsi pembinaan labatorium daerah5. Belum optimalnya jaminan kesehatan masyarakat Papua tidak mampu6. Rendah pelayanan kesehatan kesehatan di daerah terbelakang, dan terisolir7. Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan



	2. Rendahnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya pelayanan antenatal2. Rendahnya pelayanan persalinan3. Rendahnya pelayanan neonatus4. Rendahnya status gizi (gizi buruk dan kurang) dan masih tingginya prevalensi anak kerdil/anak kurus dan sangat kurus (<i>stunting</i>).5. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan.6. Rendahnya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja7. Terbatasnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terbelakang dan terisolir8. Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
	3. Masih tingginya angka kesakitan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular2. Masih tingginya kasus penyakit menular endemik di daerah terpencil dan terisolir3. Rendahnya cakupan pelayanan imunisasi pada ibu, bayi dan anak, serta terbatasnya akses pelayanan imunisasi di kampung/desa.4. Belum optimalnya sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian penyakit (KLB)5. Belum optimalnya penanggulangan bencana krisis masalah kesehatan.



		6. Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
	4. Terbatasnya Sumberdaya Kesehatan	1. Belum terpenuhinya standar ketenagaan, ketersediaan, distribusi dan kualitas di sarana pelayanan kesehatan 2. Belum terpenuhinya alat kesehatan, perbekalan farmasi obatan-obatan 3. Terbatasnya tenaga kesehatan di daerah terbelakang dan terisolir 4. Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
	5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	1. Rendahnya budaya kerja dan disiplin aparatur 2. Rendahnya pemahaman tugas fungsi dan uraian tugas oleh aparatur 3. Rendahnya kapasitas aparatur dibidang admininstrasi dan manajemen pemerintahan. 4. Belum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten.

Berbaskan tabel diatas, dapat diidentifikasi permasalahan kesehatan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan yang memenuhi standar.
2. Rendahnya akses pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan
3. Belum optimalnya sistem rujukan
4. Belum terpenuhinya standar mutu pelayanan labotorium dan terbatasnya fungsi pembinaan labotorium daerah



5. Belum optimalnya jaminan kesehatan masyarakat Papua
6. Rendah pelayanan kesehatan di daerah terbelakang, dan terisolir
7. Masih rendahnya pelayanan antenatal
8. Rendahnya pelayanan persalinan
9. Rendahnya pelayanan neonatus
10. Rendahnya status gizi (gizi buruk dan kurang) dan masih tingginya prevalensi anak kerdil/anak kurus dan sangat kurus (*stunting*).
11. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan.
12. Rendahnya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja
13. Terbatasnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terbelakang dan terisolir
14. Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
15. Masih tingginya kasus penyakit menular endemik didaerah terpencil dan terisolir
16. Rendahnya cakupan pelayanan imunisasi pada ibu, bayi dan anak, serta terbatasnya akses pelayanan imunisasi di kampung/desa.
17. Belum optimalnya sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian penyakit (KLB)
18. Belum optimalnya penanggulangan bencana krisis masalah kesehatan.
19. Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
20. Belum terpenuhinya standar ketenagaan, ketersediaan, distribusi dan kualitas di sarana pelayanan kesehatan



21. Belum terpenuhinya alat kesehatan, perbekalan farmasi obatan-obatan
22. Terbatasnya tenaga kesehatan di daerah terbelakang dan terisolir
23. Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
24. Rendahnya budaya kerja dan disiplin aparatur
25. Rendahnya pemahaman tugas fungsi dan uraian tugas oleh aparatur
26. Rendahnya kapasitas aparatur dibidang admininstrasi dan manajemen pemerintahan.
27. Belum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2018-2023 sebagaimana tertuang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 adalah “PAPUA BANGKIT MANDIRI SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”, visi ini dijabarkan dalam 5 misi.

Misi yang terkait dengan urusan kesehatan adalah misi ke-1 **“Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM”** dan misi ke-5 **“Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu”** selanjutnya visi, misi, sasaran dan indikator disajikan pada matriks berikut.



Tabel. 3.2

Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019-2023

VISI		
PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN		
Misi (M1) Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Misi (M5) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu	
Tujuan (T1) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan beretika	Tujuan (7) Meningkatkan pemerataan pembangunan	
Sasaran (S4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Papua	Sasaran (S32) Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan menjadi halaman depan negara	Sasaran (S34) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)
Angka Harapan Hidup	65,86	69,59
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	216 (estimasi SUPAS 2015)	200
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	24 (estimasi SUPAS2015)	20

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang terkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel. 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Papua untuk Pencapaian Visi, Misi dan Program
Pembangunan Daerah

Aspek Kesehatan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan 3. Menurunkan angka kesakitan 4. Meningkatkan sumberdaya kesehatan 5. Tata kelola pemerintahan yang baik	1. Distribusi penduduk yang tidak merata 2. Kondisi geografis yang sulit 3. Transportasi yang sulit. 4. Adanya budaya/perilaku yang tidak mendukung pola hidup sehat. 5. Pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat relatif rendah. 6. Ekonomi masyarakat relatif rendah. 7. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar 8. Terbatasnya jangkauan petugas Puskesmas 9. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata 10. Terbatasnya kapasitas tenaga kesehatan 11. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	1. Pendanaan 15 % untuk kesehatan sesuai UU OTSUS 2. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung 3. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Papua. 4. Adanya dukungan kemitraan dengan lembaga donor 5. Sesuai tugas dan fungsi bidang/urusan kesehatan 6. Kewenangan antara provinsi dan kabupaten/ kota 7. Kepemimpinan yang kuat dan semangat perubahan

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua disinkronisasikan dan diselaraskan dengan Renstra Kementerian Kesehatan agar sasaran pembangunan Kesehatan Nasional dapat terwujud. Keselarasan antara indikator sasaran program Renstra Dinas Kesehatan Provinsi



Papua dengan Renstra Kementerian Kesehatan merujuk pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Sasaran

Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai (outcome dan impact) adalah :

Tabel. 3.4

Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Status awal	Target 2019
I	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat		
1	Angka Kematian Ibu 100.000 Kelahiran hidup	346 (SP2010)	306
2	Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Kidup	32 (2012/2013)	24
3	Prevalensi kekurangan Gizi (underweigh) pada balita (persen)	19.6 (2013)	17.0
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek (bawah dua tahun (persen)	32.9 (2013)	28.0
II	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular Tidak Menular		
1	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
2	Prevalensi HIV (persen)	0.46 (2014)	< 0.50
3	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Malaria	212 (2013)	300
4	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25.0 (2013)	23.4
5	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ Tahun (persen)	15.4	15.4
6	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun (persen)	7.2 (2013)	5.4
III	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan		
1	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600



2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
3	Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi	71.2 (2013)	95
IV	Meningkatnya perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu obat serta Sumberdaya Kesehatan		
1	Persentase kepesertaan (SJSN) kesehatan (persen)	51.8 (2014)	Min 95
2	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis ketenagaan	1.015 (2013)	5.600
3	Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang meliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
4	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75.5 (2014)	90
5	Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Strategi

Strategi pembanguna kesehatan tahun 2015-2019 adalah :

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkuan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan



8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumberdaya manusia kesehatan
9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
10. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi
11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan
12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tabel 4.4.1. RPJMD Provinsi Papua, isu strategis kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan masih kurang dan belum memadai
2. Akses memperoleh layanan kesehatan sulit dan mahal
3. Jumlah tenaga medis yang tersedia di tingkat kampung masih sangat kurang
4. Sarana dan prasarana mobilisasi tenaga kesehatan masih terbatas
5. Obat-obatan/vaksin/imunisasi sangat terbatas dan sulit diperoleh
6. Apotik masih jarang/terbatas, laboratorium kesehatan sangat kurang
7. Layanan jaminan kesehatan belum merata
8. Asupan gizi dan makanan tambahan bayi dan balita masih rendah
9. Dana kesehatan masih kurang



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Isu International

Isu international yang berkaitan dengan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan target yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Sektor kesehatan pada SDGS terdapat 4 goals dan 19 target dan 31 indikator, yang berada pada goal 2,3,5 dan 6 yakni :

Goals ke 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, pada tahun 2030 :

Mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi, sepanjang tahun

Mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target international tahun 2025 untuk penurunan stunting dan wasting dan



kebutuhan gizi remaja perempuan dan wanita hamil dan menyusui serta lansia.

Goals ke 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu pada 2030

1. Mengurangi AKI hingga 70 per 100.0000 KH
2. Mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan angka kematian balita 25 per 1.000 KH
3. Mengakhiri epidemi AIDS Tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya
4. Mengurangi 1/3 kematian prematur akibat penyakti tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong keserhatan dan kesejahteraan mental.
5. Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalgunaan narkotika dan alkohol yang mebahayakan
6. Mengurangi setengah jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas
7. Menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi
8. Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif dan kualitas bagi semua orang



9. Mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi air dan tasnah

Goals ke 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan

1. Sunat perempuan (female genital mutilation)
2. Akses pada pelayanan reproduksi termasuk KB
3. Pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja

Goals ke 6 Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua, berkaitan erat dengan perilaku hidup bersih sehat (PHBS.)

1. Akses air bersih
2. Akses sanitasi dasar layak.

3.5.2 Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Kementerian Kesehatan, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah dan isu internasional (SDGs).

Tabel 3.5

Matriks keselarasan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi dengan sasaran jangka menengah Kementerian Kesehatan , KLHS dan SDGs

No	Sasaran	Kementeri Kesehatan	KLHS	SDGs	Keterangan
1	Meningkatnya akses dan kualitas sarana pelayanan kesehatan	√	√	√	Selaras
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	√	√	√	Selaras



3	Menurunnya angka kesakitan	✓	✓	✓	Selaras
4	Mengoptimalkan sumberdaya kesehatan	✓	✓	✓	Selaras
5	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan	✓	✓	✓	Selaras

Penetapan Isu strategis ditetapkan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan kriteria diatas, dapat disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 3.6
Penentuan isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua

No	Isu Strategis	Kriteria Penilaian						SCORE/ NILAI
		1	2	3	4	5	6	
1	Akses dan kualitas sarana pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
2	Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6



3	Menurunkan angka kesakitan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
4	Mengoptimalkan sumberdaya kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

Isu strategis yang menjadi fokus sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas sarana pelayanan kesehatan.
2. Meningkat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
3. Menurunnya angka kesakitan
4. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan
5. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi urusan kesehatan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Urusan Kesehatan RPJMD
Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Capaian kondisi awal RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-.....						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Angka Harapan Hidup	69.19	66.59	67.33	68.07	68.83	69.59	69.59	
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	216	216	212	208	204	200	200	
3	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	24	24	23	22	21	20	20	

Catatan : AKI dan AKB SUPAS 2015

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah **“Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan”** dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase Distrik yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi sebesar 71,23%
2. Persentase Rumah Sakit yang tersertifikasi



Akreditasi sebesar 100%

3. Presentase Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua sebesar 64%

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Cakupan (%) kunjungan ibu hamil K4 sebesar 70%
2. Cakupan (%) pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 45%
3. Cakupan (%) pelayanan anak balita sebesar 40%
4. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (stunting) sebesar 23%
5. Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih sebesar 30%
6. Cakupan (%) keluarga akses terhadap asanitasi sebesar 60%
7. Cakupan (%) PHBS sebesar 45%
8. Cakupan (%) Poyandu Aktif sebesar 87%

Sasaran 3 : Mengendalikan, mencegah dan memberantas penyakit dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria sebesar 69%
2. Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin 32,2%
3. Persentase pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati sebesar 95%



4. Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu sebesar 6 Kab/Kota
5. Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA sebesar 22,8%
6. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 95%
7. Cakupan pelayanan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB) Provinsi sebesar 100%
8. Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk sebesar 23 kab/kota
9. Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria (kaki gajah) 18 Kabupaten /Kota

Sasaran 4 : Mengkatnya kualitas sumberdaya kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minmal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan) sebesar 90%
2. Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin sebesar 92%
3. Persentase Pelaksanaan Diklat sesuai standart sebesar 100%

Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan , terluar dan tertentu dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Persentase ketersediaan puskesmas di daerah perbatasan sebesar 100%



2. Cakupan pelayanan kesehatan (KIA, Gizi dan penyakit menular) di daerah perbatasan, terbelakang terdepan, terluar dan tertentu sebesar 50%
3. Cakupan pelayanan kesehatan didaerah bencana /berpotensi bencana dalam krisis bencana sebesar 100 %

Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah sebesar 88 %

Tujuan sasaran dan indikator kinerja serta pentahapan pencapaiannya sebagaimana disajikan pada matriks tabel berikut :



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023
Untuk mendukung sasaran RPJMD Provinsi Papua 2019-2023

Misi ke-1 (M1)		Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM							
Tujuan (T) 1 RPJMD		Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan beretika							
Sasaran (S) 4 RPJMD		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Papua							
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN (impac, outcome)	SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-.....				
(1)	(02)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan	S1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Persen	66.59	67.33	68.07	68.83	69.59
			Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000 KH	216	212	208	204	200
			Angka Kematian Bayi (AKB)	1000 KH	24	23	22	21	20
	S2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas	Cakupan Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi	Persen	30.77	42.70	52.14	62.11	71.23
			Cakupan Rumah Sakit a yang tersertifikasi Akreditasi	Persen	62.79	86.05	100	100	100
			Cakupan Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua	Persen	44	48	53	58	64



			Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	30	40	50	60	70
			Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	Persen	25	30	35	40	45
			Cakupan Neonatus	Persen	25	30	35	40	45
			Cakupan pelayanan anak balita	Persen	20	25	30	35	40
			Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (stunting)	Persen	27	26	25	24	23
			Cakupan masyarakat akses terhadap air bersih	Persen	43.5	47.5	51.5	55.5	60
			Cakupan keluarga akses terhadap sanitasi	Persen	20	22	24	27	30
			Cakupan PHBS	Persen	35	37.5	40	42.5	45
			Cakupan Poyandu Aktif	Persen	72	78	80	85	87
	Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan	S3 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
			Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	Persen	13.8	27.6	41.4	55.2	69
			Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	Persen	12.8	17.2	21.9	26.9	32.2
			Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	Persen	75	80	85	90	95
			Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu	Jumlah	2	3	4	5	6
			Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen	7.6	11.4	15.2	19	22.8
			Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	74	79	84	89	95



DINAS KESEHATAN PROV. PAPUA

				Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Persen	100	100	100	100	100
				Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk	Jumlah	15	17	19	21	23
				Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria	Jumlah	8	11	13	16	18
	S4	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan		Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan)	Persen	38	51	54	77	90
				Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin	Persen	82	85	87	90	92
				Pelaksanaan Diklat sesuai standart	Persen	75	75	80	80	100



DINAS KESEHATAN PROV. PAPUA

Misi (5) : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan , Terluar dan Tertentu									
Tujuan (T 7) RPJMD Provinsi Papua : Meningkatkan pemerataan pembangunan									
Sasaran (S 32) RPJMD Provinsi Papua : Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan menjadi halaman depan Negara									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-.....				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(02)	(3)	(04)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	S 5 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan , Terluar dan Tertentu		Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan	Persen	80	85	90	95	100
			Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KIJANG	Jumlah petugas	96	96	96	96	384
			Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi	Persen	30	35	40	45	50
			Cakupan Penyakit Menular endemik (Kusta, Filaria/Kaki Gajah, frambusia dan kecacingan)	Persen	30	35	40	45	50
			Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Persen	100	100	100	100	100
	S 6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Satuan	84	85	86	87	88



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 di bidang/urusan kesehatan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudnya tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yakni “Papua Sehat yang Berkeadilan” maka harus didukung dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat, selaras dan konsisten dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan kemandirian yang berkeadilan

Masyarakat adalah penerima pelayanan dan sekaligus sebagai pelaku pelayanan kesehatan sampai di daerah terpencil dan terisolir demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui Pelayanan Kesehatan bergerak kaki telanjang.

2. Intervensi berbasis/ pendekatan wilayah (berbasis kewilayahannya).

Keragaman etnis dan budaya serta karakteristik wilayah mengharuskan program pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan berbasis wilayah, sehingga intervensi pelayanan di 5 wilayah adat yang meliputi Wilayah Adat Mamta yang meliputi Kabupaten Jayapura, Keerom, Membramo Raya dan Kota Jayapura,



Saereri yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen, Ha Anim meliputi Kabupaten Merauke, Bovendigoel, Mappi, Asmat dan Mimika, Mee Pago meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai dan La Pago yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, Puncak Jaya, Nduga dan Puncak,

3. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui peningkatan disiplin, kinerja dan kapasitas aparatur serta penerapan SAKIP secara konsisten.

Strategi dan arah kebijakan mewujudkan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel 5.1. sebagai berikut :



<p>Misi ke-1 (M1) : Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM</p> <p>Tujuan ke- 1 (T1) RPJMD :: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan beretika</p> <p>Sasaran ke-4 (S4) RPJMD : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Papua</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan	<p>S1 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas</p> <p>S2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas</p>	<p>1 Menigkatkan akses pelayana kesehatan dasar yang berkualitas</p> <p>2 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas</p> <p>3 Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua/Kartu Papua Sehat baik kualitas pelayanan, akses pelayanan dan akuntabilitas anggaran</p> <p>1 Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pementahan gizi masyarakat dalam mewujudkan generasi emas Papua</p>	<p>1 Setiap distrik memiliki minmal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi</p> <p>2 Mewujudkan sistem penilaian kinerja FKTP melalui instrumen penilaian kinerja</p> <p>3 Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin implementasi patient safety, standar pelayana kedokteran,dan standar pelayana keperawatan</p> <p>4 Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional di 5 Wilayah Adat</p> <p>5 Integrasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat</p> <p>1 Pelayanan antenatal, persalinan difasyankes oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas, pelayanan neonatus, bayi dan anak</p> <p>2 Penguatan kapasitas SDM dalam melaksanakan supervisi fasilitatif dan pelacakan kasus gizi buruk ke kabupaten/kota</p> <p>3 Penguatan SDM dalam sistem pencatatan pelaporan berbasis elektronik dan evidence base</p> <p>4 Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dan mengaktifkan peran serta masyarakat melalui Posyandu</p> <p>5 Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi kampung yang bermasalah air bersih dan sanitas</p>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	S3 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1 Pencegahan penyakit menular, tidak menular dan penyakit menular endemik khususnya di daerah terpencil dan terisolir	1 Pengendalian penyakit menular AIDS, TB dan Malaria 2 Penencegahan dan pengendalian penyakit DBD, Diare dan penyakit Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 3 Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak menular 4 Pemberantasan dan pengendalian penyakit menular endemik kusta, kaki gajah dan frambusia
	S4 Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan	1 Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata disemua pustekmas dan jaringannya, dengan prioritas pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan 2 Menjamin ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi di pustekmas dan jaringannya	1 Meningkatkan distribusi tenaga dan penangkatan tenaga lokal/setempat 2 Meningkatkan kualitas petugas melalui pelatihan 3 Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi tenaga kesehatan 4 Mengembangkan insentif dan penyediaan fasilitas bagi petugas 5 Pengadaan obata-obatan program dan buffer stock, pengelolaan obat sesuai standar dan distribusi/pengiriman obat-obatan bagi fasylanes yang mengalami kekurangan 6 Membangun sistem imformasi dan jaringan imformasi terintegrasi dibidang kefarmasian dan alat kesehatan
	S 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1 Monitoring dan evaluasi secara reguler dan konsisten 2 Penegakan disiplin dan penilaian kinerja yang obyektif 3 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutuan



Misi ke-5 (M5) : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan , Terluar dan Tertentu			
Tujuan ke- 1 (T1) RPJMD : Meningkatkan pemerataan pembangunan			
Sasaran ke-4 (S4) RPJMD : Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan menjadi halaman depan Negara			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan	S 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan , Terluar dan Tertentu	<ol style="list-style-type: none">1 Penyediaan sarana prasarana, pelayanan kesehatan dasar(primer) sesuai standar2 Pelayanan kesehatan proaktif/bergerak(pelayanan kesehatan kaki telanjang) puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service dan telemedicine3 Pengendalian dan pemberantasan penyakit-penyakit endemik seperti Filaria (kaki gajah), kusta dan frambusia	<ol style="list-style-type: none">1 Pembangunan dan peningkatan Puskesmas di perbatasan2 Penugasan satuan tugas (SATGAS) Kaki Telanjang3 Survei, penemuan penderita dan pengobatan di daerah endemik serta mempercepat pemberantasan penyakit endemik
	S 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none">1 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<ol style="list-style-type: none">1 Monitoring dan evaluasi secara reguler dan konsisten2 Penegakan disiplin dan penilaian kinerja yang obyektif3 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutuan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 merupakan arah dan pentahapan pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dalam sejumlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana disajikan dalam tabel 6.1

Program-program yang disusun merupakan program rutin dan urusan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan prioritas utama mendukung program prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2023 dan program lanjutan periode sebelumnya yang belum tuntas antara lain, program pengembangan Rumah Sakit Regional di 5 (lima) wilayah adat yaitu Rumah Sakit Regional Nabire, Merauke, Wamena, Biak dan Abepura, peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang tersertifikasi akreditasi, program Kartu Papua Sehat yang dilanjutkan dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat (KIS), pelayanan kesehatan daerah terbelakang,terpencil/terisolir dan terdepan melalui kegiatan satgas kaki telanjang, pelayanan kesehatan ibu dan anak peningkatan status gizi masyarakat dan penurunan prevalensi anak kerdil/anak kurus dan sangat kurus (stunting), pendampingan daerah bermasalah kesehatan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular HIV-AIDS,



Tuberkulosa dan malaria dan pemberantasan penyakit menular terabaikan (penyakit menular endemik pada daerah terbelakang, terpencil dan terdepan) seperti kusta, filaria (kaki gajah), termasuk program bidang kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke 20 Tahun 2020.

Rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1. sebagai berikut.



Tabel 6.1.

Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Mewujudkan Papua Sehat yang Berkeadilan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	S 1 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	1 0 0 2 2 1 3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase Distrik yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi	9	28		46		64		82		100		100		Bidang Yankes	29 Kab/Kota		
				Jumlah Distrik yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	29	64		62		62		62		61		340		Bidang Yankes	29 Kab/Kota		
				Pembinaan Akreditasi Puskesmas	14	6	641,930,000	10	597,000,000	10	597,000,000	10	597,000,000	10	597,000,000	29	2,388,000,000	Bidang Yankes	29 kab/kota		
				Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP	0	40	284,150,000	40	338,800,000	40	338,800,000	40	338,800,000	40	410,600,000	200	1,427,000,000	Bidang Yankes	5 wildat		
				Pembinaan Teknis Program Pelayanan Primer	0			10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	29	1,200,000,000	Bidang Yankes	29 kab/kota		



					Pembinaan Teknis PIS-PK ke kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan teknis PIS-PK	0	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	50	1,500,000,000	Bidang Yankes	29 kab/kota
					Pertemuan Pemutakhiran Data Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar.	Jumlah peserta pemutakhiran data puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	34			72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	322	2,458,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
				Kegiatan	Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas	Jumlah pendamping akreditasi puskesmas yang dilatih	96			30	650,000,000	30	700,000,000	30	750,000,000	30	800,000,000	216	2,900,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
					Verifikasi Pemilihan Puskesmas Berprestasi	Jumlah Puskesmas Berprestasi yang terverifikasi	0			3	145,650,000	3	145,650,000	3	145,650,000	3	145,650,000	12	582,600,000	Bidang Yankes	29 kab/kota
					Pertemuan Pemutakhiran Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Jumlah peserta yang melaksanakan pemutakhiran data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	0			72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	288	2,458,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
					Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen	Jumlah peserta Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen	0	40	294,000,000	40	294,000,000	40	294,000,000	40	294,000,000	40	370,000,000	200	1,546,000,000	Bidang Yankes	5 wilayah adat
					Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko	Jumlah peserta Workshop keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko	0	40	294,000,000	40	294,000,000	40	294,000,000	40	294,000,000	40	370,000,000	200	1,546,000,000	Bidang Yankes	5 wilayah adat
			Kegiatan	Bimbingan Teknis	Jumlah bimtek puskesmas	0			6	198,320,000	7	224,840,000	5	178,200,000	7	172,480,000	25	773,840,000	Bidang Yankes	24 lokasi sesuai	



					Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar Perbatasan	perbatasan															Permenkes	
					Pertemuan Sosialisasi pembuatan profil puskesmas	Jumlah peserta yang tersosialisasi pembuatan profil puskesmas	0			40	294,000,000	40	294,000,000	40	294,000,000	40	370,000,000	160	1,252,000,000	Bidang Yankes	5 wilayah adat	
					Verifikasi Registrasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang terverifikasi untuk registrasi puskesmas	31			74	300,000,000	72	300,000,000	72	300,000,000	72	596,000,000	321	1,496,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
					Pelatihan Manajemen Puskesmas	Jumlah peserta yang terlatih Manajemen Puskesmas	0			30	700,000,000	30	700,000,000	30	700,000,000	30	700,000,000	120	2,800,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
					Pertemuan Evaluasi Program Pelayanan Primer	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi program pelayanan primer	0			72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	288	2,458,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
					Monitoring Pelayanan Kesehatan Prime	Jumlah Peserta Monitoring	0	180	175,250,000									180	175,250,000	Bidang Yankes	Provinsi	
					Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan PIS-PK	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi PIS-PK	0	72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	72	614,500,000	360	3,072,500,000	Bidang Yankes	Provinsi	
					Pertemuan Sosialisasi Puskesmas BLU	Jumlah peserta yang tersosialisasi Puskesmas BLU	0			-	-	-	-	-	72	552,800,000	72	552,800,000	144	1,105,600,000	Bidang Yankes	Provinsi
			Program	Peningkatan Kesehatan Perorangan	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi Akreditasi	56	60		70		80		90		100		100			Bidang Yankes		



					Persentase Rumah Sakit TNI/POLRI dan Swasta yang tersertifikasi Akreditasi	46	38		50		63		75		100		100		Bidang Yankes	
		Kegiatan	Workshop Standar Akreditasi RS KARS edisi I	Jumlah peserta workshop Standar Akreditasi RS KARS edisi I	75	60	420,300,000	60	435,000,000	65	450,000,000	70	470,000,000	75	500,000,000	345	2,275,300,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Workshop Implementasi Data Sarana, Prasarana (ASPAK) di Fasyankes Tingkat Lanjut	Jumlah peserta workshop Implementasi Data Sarana Prasarana (ASPAK) di Fasyankes Tk.Lanjut	32	40	350,000,000	42	370,000,000	45	400,000,000	50	450,000,000	52	520,000,000	221	2,090,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Workshop Standar Rumah Sakit Pendidikan	Jumlah peserta Workshop Standar Rumah Sakit Pendidikan	25	30	300,000,000	45	350,000,000	50	400,000,000					120	1,050,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Workshop Penyusunan Perijinan dan Tata Kelola Lingkungan RS	Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Perijinan dan Tata Kelola Lingkungan RS	25	30	250,000,000	35	300,000,000	35	350,000,000	40	400,000,000	50	500,000,000	190	1,800,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Pelatihan BTCLS di Rumah Sakit	Jumlah peserta pelatihan BTCLS	25	30	350,000,000	35	400,000,000	35	420,000,000	20	440,000,000	30	450,000,000	150	2,060,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Pelatihan ATCLS di Rumah Sakit	Jumlah peserta pelatihan ATCLS	25	30	350,000,000	35	400,000,000	35	420,000,000	25	440,000,000	30	450,000,000	155	2,060,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Bimbingan Teknis Cerebrovaskuler bagi tenaga Kesehatan di tingkat lanjut	Jumlah petugas yang mendapat bimbingan Teknis Cerebrovaskuler di tingkat lanjut	35	30	230,000,000	35	250,000,000	35	300,000,000	25	330,000,000	35	400,000,000	160	1,510,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	
			Bimbingan teknis penanganan cancer bagi tenaga kesehatan di Fasyankes	Jumlah petugas yang mendapat bimtek penanganan cancer di fasyankes	35	30	180,000,000	35	200,000,000	35	250,000,000	25	270,000,000	35	300,000,000	160	1,200,000,000	Bidang Yankes	Provinsi	



					Peningkatan kemampuan Teknis Audit Internal Radio Diagnostik	Jumlah peserta peningkatan kemampuan Teknis Audit Internal Radio diagnosis	50	20	220,000,000	25	250,000,000	35	280,000,000	40	300,000,000	45	350,000,000	165	1,400,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
					Peningkatan Kemampuan Teknis PME dan PPRA	Jumlah peserta peningkatan kemampuan Teknis PME dan PPRA	8	30	250,000,000	35	350,000,000	35	400,000,000	40	450,000,000	45	500,000,000	185	1,950,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
					Workshop pembentukan RS BLUD	Jumlah peserta workshop pembentukan RS BLUD	9	20	250,000,000	35	350,000,000	35	400,000,000	40	450,000,000	45	500,000,000	175	1,950,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
				Program	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Percentase Rumah Sakit Provinsi, RS regional, RS sub Regional yang telah melakukan sistem Rujukan berjenjang dan terintegrasi	29	50		60		71		88		100		100		Bidang Yankes	
						Percentase Rumah Sakit yang mempunyai Sistem Rujukan terintegrasi	29	50		60		71		88		100		100		Bidang Yankes	
						Percentase Rumah Sakit yang mempunyai Alur Rujukan	29	50		60		71		88		100		100		Bidang Yankes	
						Percentase Rumah Sakit yang mempunyai SOP Rujukan Masuk, Keluar dan Balik	50	20		25		26		25		30		126		Bidang Yankes	
			Kegiatan	Workshop Penyusunan Pedoman Sistem Rujukan Regional	Jumlah Pedoman Sistem Rujukan		5	5	550,000,000	5	550,000,000	5	550,000,000	5	550,000,000	5	550,000,000	25	2,750,000,000	Bidang Yankes	Provinsi





					Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional, ramuan dan ketampilan	7	9	2	2	2	22	44		Bidang Yankes						
1	0	0	1	8	Kegiatan	Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat	Jumlah Peserta Workshop Obat tradisional berbasis wilayah adat	0	15	114,900,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	75	1,114,900,000	Bidang Yankes	5 Wildat
					Penilaian Pemanfaatan Toga	Jumlah PKM dan kampung yang melaksanakan dan menggunakan Toga sesuai SOP		3	5	224,176,000	3	224,176,000	3	224,176,000	3	224,176,000	17	1,120,880,000	Bidang Yankes	5 Kab/Kota
					Sosialisasi Asman TOGA, Akupresur bagi Dosen dan Mahasiswa di P.T Kesehatan	Jumlah peserta yang tersosialisasi Asman TOGA, Akupresur .		0	36	102,000,000	36	102,000,000	36	102,000,000	36	102,000,000	180	510,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
					Pelatihan Akupresur bagi Tenaga Medis di Puskesmas	Jumlah peserta terlatih Akupresur bagi tenaga medis di Puskesmas		26	26	376,516,000	26	376,516,000	26	376,516,000	26	376,516,000	130	1,882,580,000	Bidang Yankes	26 Puskesmas
					Pembangunan Klinik Griya Sehat Pengobatan dan Terapi Tradisional	Tersedianya Klinik Griya Sehat Pengobatan dan Terapi Tradisional		0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	5	5,000,000,000	Bidang Yankes	5 Kab/Kota
1	0	0	1	0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan SP3T	Jumlah Laporan		18	18	200,000,000	18	200,000,000	18	200,000,000	18	200,000,000	90	1,000,000,000	Bidang Yankes	Provinsi
1	0	0	1	0	Penelitian Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat	Jumlah penelitian obat tradisional Berbasis Wilayah Adat		0	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	15	1,000,000,000	Bidang Yankes	3 Kab/Kota
			Program	Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Persentase error rate (tingkat kesalahan) terhadap hasil pemeriksaan		20	18		12		10		8		5		5	UPT Labkes	





					Bimbingan Teknis	Jumlah Fasyankes yang BimTek	35	40	550,000,000	50	650,000,000	60	750,000,000	75	800,000,000	75	800,000,000	335	3,550,000,000	UPT Labkes	29 Kab/Kota
					Pembangunan Gedung Laboratorium Tahap II	Jumlah Gedung yang dibangun	1	1	10,000,000,000	1	55,000,000,000							1	65,000,000,000	UPT Labkes	Provinsi
					Pemeliharaan Alat laboratorium, Kalibrasi, Pengolahan Limbah, Jaringan Limbah	Jumlah Alat dan Jaringan Limbah yang diperbaiki dan Terkalibrasi		5	475,000,000	7	560,000,000	8	650,000,000	10	750,000,000	12	800,000,000	15	3,235,000,000	UPT Labkes	Provinsi
					Penyusunan Dokumen AMDAL Laboratorium	Adanya Dokumen Amdal Laboratorium		1	750,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	1	325,000,000	1	1,900,000,000	UPT Labkes	Provinsi
	1 0 0 2 2 1 4	Program	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua			44			48		53		58		64		64		Sekretariat	
	1 0 0 2 1 4 0	Kegiatan	Monitoring, Evaluasi/Bimtek) dan Pelaporan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Papua di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Papua di Kabupaten/Kota			23	303,014,000	25	333,315,400	27	366,646,000	28	403,311,000	29	443,642,000	132	1,849,928,400	Sekretariat	29 Kab/Kota	
	1 0 0 2 1 4 1		Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat papua di Rumah sakit Mitra	Jumlah klaim pembiayaan dari Rumah Sakit Mitra yang melayani Pasien OAP			5204	5,276,000,000	5724	5,797,000,000	6296	6,376,700,000	6925	7,014,370,000	7617	7,715,807,000	31762	32,179,877,000	Sekretariat	29 Kab/Kota	
	1 0 0 2 1 4 2		Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Papua	Jumlah Puskesmas yang Melayani Pasien OAP			13	2,925,000,000	13 PKM	2,925,000,000	13	2,925,000,000	13	2,925,000,000	13	2,925,000,000	65	14,625,000,000	Sekretariat	65 Puskesmas	



						Di FKTP Kota Jayapura																
						Pengelolaan ,Pencatatan dan Pelaporan menggunakan aplikasi Jaminan Kesehatan Papua	Jumlah Pengelolaan ,Pencatatan dan Pelaporan menggunakan aplikasi Jaminan Kesehatan Papua		0	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	4	1,750,000,000	Sekretariat Provinsi	
			1 0 0 2 2 1 4	Program	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Jumlah Penduduk yang Menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS)		30		30		40		100		100		100		Sekretariat		
				Kegiatan	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartus Indonesia Sehat (KIS)		1	1	1,585,800,000	1	1,744,380,000	1	1,918,818,000	1	2,110,699,800	1	2,321,769,780	5	9,681,467,580	Sekretariat	
S 2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas		1 0 0 3 2 2 2	Program	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Persentase Kabupaten/Kota di 5 wilayah adat cakupan K4 meningkat 50 %		30		40		50		60		70				Bidang Kesmas		
				Kegiatan	Pelatihan Kegawat daruratan maternal-neonatal	Jumlah tenaga yang dilatih		60	410,000,000	60	410,000,000	60	410,000,000	60	410,000,000	60	410,000,000	300	2,050,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	



			1	0	0	3	Program	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Percentase Kabupaten/Kota di 5 wilayah adat cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat 50 %	25	30	35	40	45					Bidang Kesmas	29 kab/kota			
							Kegiatan	Supervisi Fasilitatif KIA	Jumlah Kabupaten /Kota yang disupervisi	29	29	300,000,000	29	300,000,000	29	300,000,000	29	300,000,000	29	1,500,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
								Jumlah Petugas PWS KIA yang dilatih	29	29	300,000,000	29	300,000,000	29	300,000,000	29	300,000,000	145	1,500,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota		
								Pengadaan Kartu Ibu, Buku KIA, Buku Kohort/Register pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Kartu, Buku KIA, Buku Kohort/Register yang diadakan	300	300	300,000,000	300	300,000,000	300	300,000,000	300	300,000,000	1,500	1,500,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
								Pengadaan Alat, Bahan dan Obat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Paket Alat, Bahan dan obat-obatan KIA yang diadakan.	10	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	50	2,500,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
								Penggunaan buku KIA di masyarakat melalui pelatihan petugas dan pengadaan buku	Jumlah Kabupaten /Kota yang menggunakan buku		29	980,000,000		29	980,000,000		29	980,000,000		4,900,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
								Peningkatan kunjungan bayi Neonatus (KN1)	Percentase Neonatus yang diskirining		50	460,000,000		50	460,000,000		50	460,000,000		50	2,300,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota
								Peningkatan kapasitas tenaga dalam pencatatan dan pelaporan KIA	Jumlah petugas dilatih		29	410,000,000		29	410,000,000		29	410,000,000		2,050,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	



						Program	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Percentase Kabupaten/Kota di 5 wilayah cakupan pelayanan anak meningkat 50 %	20	25	30	35	40	40	40		Bidang Kesmas	29 kab/kota			
						Kegiatan	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah	Jumlah petugas yang dilatih	60	410,000,000	60	410,000,000	60	410,000,000	60	410,000,000	300	2,050,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
							Pengadaan alat permainan edukatif	Jumlah paket permainan	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50	1,000,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
			1 0 x 2 2	2 x 0		Program	Perbaikan Gizi Masyarakat	Percentase Kabupaten/Kota yang dapat menurunkan status gizi buruk dan sedang pada balita													
								Percentase Kabupaten/Kota yang dapat menurunkan prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) 2 %	10		15	20	30	35			Bidang Kesmas	29 kab/kota			
			1 0 x 2 2	2 x 0	2	Kegiatan	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Prosentase balita kurus yang mendapatkan PMT		100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	30,000,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota
			1 0 0 2 2	2 1 0	5		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah Laporan	29	29	310,000,000	29	310,000,000	29	310,000,000	29	310,000,000	100	1,550,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota
			1 0 0 2 2	2 1 1		Program	Pengembangan Lingkungan	Cakupan masyarakat akses	43.5	44.0		48		52		56		60		Bidang Kesmas	29 kab/kota



					Sehat	terhadap air bersih															
						Cakupan keluarga akses terhadap asanitasi		20	22	24		27		30		30					
			Kegiatan	Pembinaan dan Pelaksanaan STBM	Jumlah kampung STBM dan SBS		50	600,000,000	50	650,000,000	50	700,000,000	50	750,000,000	50	750,000,000	250	3,450,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
		1 0 0 2 2 1 1		Pengawasan Kualitas Air	Prosentase Kualitas air yang memenuhi syarat kes		30	180,000,000	33	200,000,000	36	250,000,000	40	280,000,000	48	300,000,000	48	1,210,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
				Orientasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	Jumlah pengelolah Limbah RS		20	200,000,000	20	225,000,000	20	250,000,000	20	275,000,000	20	300,000,000	20	1,250,000,000	Bidang Kesmas	25 Rumah sakit	
				Monitoring dan evaluasi ke Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit mengelolah Limbah Sakit		10	180,000,000	15	140,000,000	18	140,000,000	20	160,000,000	25	175,000,000	25	795,000,000	Bidang Kesmas	25 Rumah sakit	
				Program : Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah Pos UKK		26		31		36		41		60		60		Bidang Kesmas	29 kab/kota	
				Orientasi kesehatan kerja	Jumlah petugas dilatih		30	180,000,000	30	200,000,000	30	220,000,000	30	240,000,000	30	260,000,000	30	1,100,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
				Pembinaan Pos UKK di Kab/kota	Jumlah kab/kota yang dibina		29	350,000,000	29	375,000,000	29	400,000,000	29	425,000,000	29	450,000,000	29	2,000,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
			Program	Pembinaan Kebugaran Jasmani masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kebugaran jasmani bagi kelompok masyarakat		12	310,000,000	20	10,340,000,000	25	370,000,000	30	400,000,000	35	430,000,000	35	11,850,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
				Orientasi pembinaan kebugaran jasmani	Jumlah petugas yang dilatih		29	180,000,000	29	200,000,000	29	220,000,000	29	240,000,000	29	260,000,000	29	1,100,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
				Peralatan penunjang kesehatan kerja dan olah raga	Tersedia peralatan penunjang kesjaor		10	130,000,000	10	140,000,000	10	150,000,000	10	160,000,000	10	170,000,000	50	750,000,000	Bidang Kesmas	10 kab/kota	



					Dukungan Sarana Prasarana dalam rangka PON 20 Tahun 2020	Jumlah Sarana prasarana kesehatan pendukung PON 20					10,000,000,00								10,000,000,00	Bidang Kesmas	5 kab/kota
S3 Meningkat nya Pencegah an dan Pengendal ian Penyakit		1 0 0 1 9 2 1 9 0	Program	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS	35	1,100,000,000	38	1,350,000,000	40	1,600,000,000	43	1,850,000,000	45	2,100,000,000	45	8,000,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota		
			Kegiatan	Prosentase Posyandu Aktif	50	60	70	80	90	100											
			1 0 0 1 9 2 1 9 1	Advokasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten/ Kota melaksanakan Germas	50	60	300,000,000	70	350,000,000	80	400,000,000	90	450,000,000	100	500,000,000	400	2,000,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
			1 0 0 1 9 4 1 9 0	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah UKBM yang di Bina	50	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	500	1,500,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
			1 0 0 1 9 4 1 9 1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media yang di sebarluaskan	5	5	500,000,000	5	600,000,000	5	700,000,000	5	800,000,000	5	900,000,000	25	3,500,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
			1 0 0 1 9 4 1 9 0	Monitoring evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan din kab/kota	Jumlah Laporan	15	15	100,000,000	15	150,000,000	15	200,000,000	15	250,000,000	15	300,000,000	75	1,000,000,000	Bidang Kesmas	29 kab/kota	
			S3 Meningkat nya Pencegah an dan Pengendal ian Penyakit	Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan PIMS.	39,978	4500		4500		4500		4500		4500	60491	Balai PP ATM				
				Kegiatan	Pelatihan Komprehensif HIV	Jumlah peserta terlatih Komprehensif HIV	644	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	1144	4,250,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov



				Pelatihan TIPK Pada Petugas Layanan TB DOTS	Jumlah petugas layanan TB DOTS terlatih TIPK	30	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	280	2,500,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
				Workshop Task Shifting bagi Bidan Pustu	Jumlah Bidan Pustu yang mengikuti Workshop Task Shifting	0	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	250	2,500,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
				Pelatihan Pencegahan Penularan HIV ,Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak	Jumlah peserta terlatih Pencegahan Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak	50	120	1,200,000,000	120	1,200,000,000	120	1,200,000,000	120	1,200,000,000	120	1,200,000,000	650	6,000,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan PIMS.	Jumlah ODHA yang pernah mendapatkan Pengobatan ARV	21,013	4500		4500		4500		4500		4500		39507		Balai PP ATM	
			Kegiatan	Pelatihan Perawatan Dukungan dan Pengobatan ARV	Jumlah peserta terlatih Perawatan Dukungan dan Pengobatan ARV	250	60	817,400,000	60	817,400,000	60	817,400,000	60	817,400,000	60	817,400,000	550	4,087,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
				Pelatihan Konselor KTHIV	Jumlah peserta terlatih KTHIV	60	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	310	2,500,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
				Pertemuan Evaluasi Program HIV-AIDS	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Program HIV-AIDS	70	140	1,500,000,000	140	1,500,000,000	140	1,500,000,000	140	1,500,000,000	140	1,500,000,000	770	7,500,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
				Pengadaan Format Pencatatan dan Pelaporan Perawatan Pasien HIV-AIDS	Jumlah pengadaan format Pencatatan dan Pelaporan Perawatan Pasien HIV-AIDS	5	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	10	150,000,000	Balai PP ATM	Dinkes Prov
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan PIMS.	Jumlah ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	6,384	2925		3150		3375		3600		3825		23161		Balai PP ATM	



					Kegiatan	Pembinaan Teknis Program HIV-AIDS ke kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Teknis Program HIV-AIDS	0	29	456,850,000	29	456,850,000	29	456,850,000	29	456,850,000	29	456,850,000	29	2,284,250,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota
				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan PIMS.	Jumlah ODHA dengan Jumlah Virus yang Tidak Terdeteksi dengan Mesin Viral Load	1,250	2633		2835		3037		3240		3443		16438			Balai PP ATM	
				Kegiatan	Pelatihan Pengambilan Sampel EID Bagi Bidan	Jumlah bidan terlatih Pengambilan Sampel EID	30	50	400,000,000	50	400,000,000	50	400,000,000	50	400,000,000	50	400,000,000	280	2,000,000,000	Balai PP ATM	Provinsi	
					Layanan yang mengirim Spesimen Viral Load dan EID	Jumlah layanan yang mengirim Spesimen Viral Load dan EID	10	240	900,000,000	240	900,000,000	240	900,000,000	240	900,000,000	240	900,000,000	250	4,500,000,000	Balai PP ATM	Provinsi	
				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan PIMS.	Jumlah Layanan Infeksi Menular Seksual	120	25		25		25		25		25		245				
					Pengadaan Media KIE	Jumlah pengadaan Media KIE IMS	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	250,000,000	Balai PP ATM	Provinsi	
				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah Kab/Kota yang memiliki RAD Penanggulangan TBC	13	18		21		25		29		29		29			Balai PP ATM	
				Kegiatan	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB untuk 5 tahun berikutnya	Jumlah Peserta penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB untuk 5 tahun berikutnya	0							26	37,041,730			26	37,041,730	Balai PP ATM	Provinsi	
					Workshop Advokasi Program Penanggulangan TB	Jumlah Peserta workshop Advokasi Program Penanggulangan TB	0	30	24,080,000									30	24,080,000	Balai PP ATM	Provinsi	



				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah Kab / Kota yang proporsi pembiayaan untuk program TB meningkat	10	18		22		26		29		29		29		29		Balai PP ATM		
			Kegiatan	Pendampingan dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah di kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota yang menyusun RAD Penanggulangan TBC	13	18	108,900,000													29	108,900,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota
				Pertemuan monitoring dan evaluasi implementasi RAD TB di tingkat Provinsi dan Evaluasi Penganggaran Program Penanggulangan TB	Jumlah Peserta monitoring dan evaluasi implementasi RAD TB di tingkat Provinsi dan Evaluasi Penganggaran Program Penanggulangan TB	0	26	27,830,000	26	30,613,000	26	33,674,300	26	37,041,730	26	40,745,903	26	40,745,903	26	40,745,903	26	40,745,903	Balai PP ATM	Provinsi
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah Kab / Kota yang telah memiliki jejaring layanan TB	6	15		20		24		29		29								Balai PP ATM	
			Kegiatan	Koordinasi penjaminan mutu layanan TB di RS Provinsi	Jumlah Peserta Koordinasi penjaminan mutu layanan TB di RS Provinsi	0	30	53,879,635	30	59,267,599	30	65,194,358	30	71,713,794	30	78,885,174	30	78,885,174	30	78,885,174	30	78,885,174	Balai PP ATM	Provinsi
				Pengkajian ulang dokumen akreditasi layanan TB RS Provinsi	Jumlah Peserta Pengkajian ulang dokumen akreditasi layanan TB RS Provinsi	0	30	53,879,635	30	59,267,599	30	65,194,358	30	71,713,794	30	78,885,174	30	78,885,174	30	78,885,174	30	78,885,174	Balai PP ATM	Provinsi
				Evaluasi hasil akreditasi RS Provinsi	Jumlah Peserta Evaluasi hasil akreditasi RS Provinsi	0	30	53,879,635	30	59,267,599	30	65,194,358	30	71,713,794	30	78,885,174					78,885,174	Balai PP ATM	Provinsi	



					Pertemuan koordinasi dengan organisasi/perhimpunan pemberi layanan TB (PERSI, PATELK, Asosiasi Apotek Indonesia)	Jumlah Organisasi/Perhimpunan pemberi layanan TB	0	10	53,879,635	10	59,267,599	10	65,194,358	10	71,713,794	10	78,885,174	10	78,885,174	Balai PP ATM	Provinsi
					Pembuatan panel tes mikroskopis																
					Pemasangan dan pelatihan penggunaan alat tes cepat																
					Pemeliharaan alat diagnostik TB di Fasyankes Provinsi Papua																
					Koordinasi dengan BPOM dan Binfar dalam pemantauan kualitas obat	Jumlah Peserta Koordinasi dengan BPOM dan Binfar dalam pemantauan kualitas obat	0	20	53,879,635	20	59,267,599	20	65,194,358	20	71,713,794	20	78,885,174	20	78,885,174	Balai PP ATM	Provinsi
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Percentase Kab/Kota minimal 80 % fasyankesnya terlibat dalam PPM (public-private mix)	0	13		17		22		29		29					Balai PP ATM	
		Kegiatan	Pencetakan dan distribusi Pedoman PPM	Jumlah buku pedoman PPM	0	300	62,806,480											300	62,806,480	Balai PP ATM	Provinsi
			Menerbitkan Kebijakan panduan atau surat edaran jejaring PPM	Surat Edaran jejaring PPM	0	1														Balai PP ATM	
			Pemantauan pelaksanaan PPM di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PPM	0	29	108,900,000	29	119,790,000	29	131,769,000	29	144,945,900	29	159,440,490	29	159,440,490	Balai PP ATM	29 Kab/Kota		



					Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Angka cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	1	0.75		0.8		0.85		0.9		0.95				Balai PP ATM			
				Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan penemuan dan pengobatan kasus TB di fasyankes	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan penemuan dan pengobatan kasus TB di fasyankes	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi			
				Program	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Angka notifikasi semua kasus TB (case notification rate / CNR) yang diobati per 100.000 penduduk	301	332		349		363		381						Balai PP ATM				
				Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan sistem investigasi kontak	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan sistem investigasi kontak	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi			
				Program	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	9,613	12458		12643		13520		14271							Balai PP ATM			
				Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Terpadu TB-HIV, TB-DM, TB-KIA (TB Anak dan TB pada Ibu Hamil)	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Terpadu TB-HIV, TB-DM, TB-KIA (TB Anak dan TB pada Ibu Hamil)	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi			
				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah Kab / Kota yang mencapai target untuk indikator persentase laboratorium	7	16		20		25		29		29					Balai PP ATM			



					mikroskopis yang mengikuti uji silang																	
			Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi penemuan kasus TB RO	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi penemuan kasus TB RO	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi		
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Cakupan penemuan kasus TB Anak	1,780	2367		2402		2569		2711							Balai PP ATM		
			Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi kasus TB anak	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi kasus TB anak	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi		
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Percentase Kab / Kota yang sudah melaksanakan pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH) untuk anak < 5 tahun	6	29		29		29		29		29				Balai PP ATM			
			Kegiatan	Penyusunan materi promosi PHBS terkait TB	Jumlah Peserta Penyusunan materi promosi PHBS terkait TB	0	20	18,150,000	20	19,965,000	20	21,961,500	20	24,157,650	20	26,573,415	20	26,573,415	Balai PP ATM	Provinsi		
				Pembuatan desain materi PHBS terkait TB	Jumlah Peserta Pembuatan desain materi PHBS terkait TB	0	10	12,045,000	10	13,249,500	10	14,574,450	10	16,031,895	10	17,635,085	10	17,635,085	Balai PP ATM	Provinsi		
				Pencetakan dan pengiriman materi	Jumlah Materi PHBS TB yang dicetak	0	300	426,605,080	300	469,265,588	300	516,192,147	300	567,811,361	300	624,592,498	300	624,592,498	Balai PP ATM	Provinsi		
				Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Jumlah Peserta Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi		



				Infeksi TB di Fasilitas kesehatan	TB di Fasilitas kesehatan																		
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Persentase anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan dibandingkan estimasi anak < 5 tahun yang memenuhi syarat diberikan pengobatan pencegahan	0	0.55		0.6		0.65		0.7		0.75						Balai PP ATM		
			Kegiatan	Regulasi Pemantauan Monitoring dan Evaluasi pelibatan kader kesehatan dan LSM dalam pengobatan pencegahan (Anak dan ODHA)	Jumlah Peserta Regulasi Pemantauan Monitoring dan Evaluasi pelibatan kader kesehatan dan LSM dalam pengobatan pencegahan (Anak dan ODHA)	0	30	108,900,000	30	119,790,000	30	131,769,000	30	144,945,900	30	159,440,490	30	159,440,490	Balai PP ATM	Provinsi			
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Persentase terbentuknya Forum Koordinasi TB di Kab / Kota	0	18		21		25		29		29						Balai PP ATM		
			Kegiatan	Pertemuan/workshop Revitalisasi Forum Koordinasi TB Provinsi	Jumlah Peserta Pertemuan	0	30	52,379,635	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	52,379,635	Balai PP ATM	Provinsi	
				Pertemuan koordinasi rutin masing masing Komisi dan pleno Forum Koordinasi TB	Jumlah Peserta Pertemuan	0	30	53,879,635	30	59,267,599	30	65,194,358	30	71,713,794	30	78,885,174	30	78,885,174	Balai PP ATM	Provinsi			



			Pertemuan/workshop penyusunan rencana kerja/kegiatan Forum Koordinasi (LP/LS & Ahli) TB sesuai dengan situasi daerah	Jumlah Peserta Pertemuan	0	30	100,000,000	5	155,000,000	4	124,000,000	4	124,000,000	4	124,000,000	29	627,000,000	Balai PP ATM	Provinsi
			Monev, koordinasi dan bimtek di Fasyankes dengan melibatkan Forum Koordinasi TB	Jumlah Peserta Monev, koordinasi dan bimtek di Fasyankes	0	30	100,000,000	6	125,000,000	5	150,000,000	5	175,000,000	5	200,000,000	29	750,000,000	Balai PP ATM	Provinsi
		Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Percentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (active case finding)	0	0.2		6		6		5		5		29		Balai PP ATM	29 Kab/Kota
		Kegiatan	Pelatihan bagi fasilitator pelatihan kader pendamping TB	Jumlah Peserta Pelatihan	0	29	350,000,000	20	400,000,000	20	425,000,000	20	450,000,000	20	475,000,000	120	2,100,000,000	Balai PP ATM	Provinsi
			Penyusunan Juknis Pendampingan kelompok dukungan sebagai pasien TB	Jumlah Peserta Penyusunan Juknis	0	20	300,000,000	6	350,000,000	6	400,000,000	6	450,000,000	5	500,000,000	29	2,000,000,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota
			Pemetaan semua stakeholder komunitas TB	Jumlah Peserta Pemetaan	0	20	350,000,000	6	400,000,000	-	425,000,000	-	450,000,000	-	475,000,000	29	2,100,000,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota
			Pertemuan Penyusunan Juknis Tatalaksana keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam penanggulangan TB	Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Juknis	0	20	100,000,000	6	125,000,000		150,000,000	5	175,000,000	5	200,000,000	29	750,000,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota



					Pemetaan wilayah daerah resiko tinggi, pasien TB dan TB RO	Jumlah Peserta Pemetaan Wilayah Daerah Resiko	0	20	100,000,000	2	125,000,000	2	150,000,000	2	175,000,000	2	200,000,000	12	750,000,000	Balai PP ATM	12 Kab/Kota
					Kampanye TB melalui media massa (TV, Radio, media cetak dan media sosial)	Jumlah Media massa yang melaksanakan kampanye TB	0	5	300,000,000	3	350,000,000	3	400,000,000	3	450,000,000	3	500,000,000	17	2,000,000,000	Balai PP ATM	17 Kab/Kota
					Pengembangan dan pengadaan media KIE dengan konten lokal	Jumlah Pengadaan media KIE dengan konten lokal	0	300	300,000,000	10	350,000,000	10	400,000,000	10	450,000,000	10	500,000,000	50	2,000,000,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat
					Pengembangan panduan tatalaksana konseling bagi petugas, komunitas dan toga sesuai konteks Papua	Jumlah Peserta pengembangan panduan tatalaksana konseling	0	20		45		60		75		90		90		Balai PP ATM	
					Pertemuan advokasi & sosialisasi integrasi layanan TB dengan UKBM secara berjenjang	Jumlah Peserta pertemuan advokasi dan sosialisasi	0	30	350,000,000	8	400,000,000	11	425,000,000	14	450,000,000	17	475,000,000	17	2,100,000,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat
					Monev layanan TB terintegrasi melalui UKBM secara berjenjang	Jumlah peserta Monev layanan TB	0	30	350,000,000	45	400,000,000	60	425,000,000	75	450,000,000	90	475,000,000	120	2,100,000,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat
				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Persentase Kab / Kota yang menggunakan SI TB	24	29		6		9		12		15		15		Balai PP ATM	5 Wil Adat
			Kegiatan		Pengumpulan data	Jumlah peserta pengumpulan data	0	10	350,000,000	45	400,000,000	60	425,000,000	75	450,000,000	90	475,000,000	120	2,100,000,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat
					Pengolahan dan analisis data	Jumlah peserta pengolahan dan analisis data	0	10		17		19		21		23		23		Balai PP ATM	5 Wil Adat



					Penyusunan laporan	Jumlah peserta penyusunan laporan	0	10	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	12,500,000,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat
					Workshop analisis data untuk tindak lanjut bagi program	Jumlah peserta workshop analisis data	0	30		11		13		15		16		18		Balai PP ATM	
					Mapping ketersediaan SDM TB	Jumlah peserta mapping ketersediaan SDM TB	0	30		4	235,735,000	3	169,754,000	2	152,000,000			13	557,489,000	Balai PP ATM	13 Kab/Kota
					Penyusunan rencana pelatihan	Jumlah peserta penyusunan rencana pelatihan	0	20	771,703,000	50	725,029,000	50	725,029,000	50	725,029,000			260	2,946,790,000	Balai PP ATM	13 Kab/Kota
			Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Persentase Kab / Kota yang tidak mengalami stock out logistik pada hari terakhir triwulan		29	29		17		7				2		18		Balai PP ATM	18 Kab/Kota
		Kegiatan		Pertemuan rutin tim terpadu perencanaan logistik	Jumlah peserta pertemuan rutin	0	20	5,175,475,000	17	4,896,596,000	7	2,358,494,000	7	2,358,494,000	2	964,099,000	18	15,753,158,000	Balai PP ATM	18 Kab/Kota	
				Bahan habis pakai (reagen Zn, pot dahak, slide, cartridge, masker, dll)				17	729,000,000	17	688,500,000	7	283,500,000	7	283,500,000	2	81,000,000	18	2,065,500,000	Balai PP ATM	18 Kab/Kota
				Bahan cetakan (formulir, media KIE, dll)			8	524,093,000	8	524,093,000	3	228,177,000	2	152,118,000	2	152,118,000	29	1,580,599,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota	
				Distribusi logistik ke Kab/Kota			12	3,285,804,000	12	3,546,968,000	22	6,188,608,000	22	6,188,608,000	29	8,016,512,000	29	27,226,500,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota	
				Realokasi logistik					13	452,727,000	10	364,599,000	10	364,599,000			33	1,181,925,000	Balai PP ATM	Provinsi	
				Pelaporan data ketersediaan logistik TB setiap triwulan	Jumlah peserta pertemuan pelaporan data	0	10		87	647,512,000	87	647,512,000	87	647,512,000	87	647,512,000	261	2,590,048,000	Balai PP ATM	Provinsi	



					Analisa ketersediaan logistik TB	Jumlah peserta analisis ketersediaan logistik TB	0	10		88	717,111,000	68	570,231,000						156	1,287,342,000	Balai PP ATM	Provinsi
					Umpam balik					5		5							5		Balai PP ATM	
					Pengembangan Riset Operasional				500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	2,500,000,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat	
				Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	0	4		23		24			26			28			Balai PP ATM	
			Kegiatan		Scaling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tatalksana PengobatanTepat Malaria	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Scaling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tatalksana PengobatanTepat Malaria	10	10	549,898,000	29	549,898,000	29	549,898,000	29	549,898,000	29	549,898,000	29	2,749,490,000	Balai PP ATM	Provinsi	
					Monitoring dan Evaluasi Malaria Centre di kabupaten/kota yang telah terbentuk	Jumlah Malaria Centre di kabupaten/kota di monitor dan evaluasi	0	7	291,773,000	29	291,773,000	29	291,773,000	29	291,773,000	29	291,773,000	29	1,458,865,000	Balai PP ATM	Provinsi	
					Penyusunan RAD Malaria di kabupaten Endemis Tinggi dan Endemis Rendah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RAD Malaria	0	7	810,870,000	29	810,870,000	29	810,870,000	29	810,870,000	29	810,870,000	29	4,054,350,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota	
					Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu di kabupaten Endemis Tinggi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu	10	5	652,340,000	29	652,340,000	29	652,340,000	29	652,340,000	29	652,340,000	29	3,261,700,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota	



					Pengembangan dan Pemantapan Malaria Center di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengembangan dan pemantapan Malaria center	0	9	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	8,590,400,000	Balai PP ATM	5 Wil Adat	
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Indoor Residual Spraying (IRS)	Jumlah peserta terlatih IRS	90	50		11		14		17		19		19			Balai PP ATM	
					Pelatihan Mikroskopis Malaria	Jumlah peserta terlatih Mikroskopis Malaria	100	100	358,726,000	28	471,526,000	25	320,700,000	25	320,700,000				118	1,471,652,000	Balai PP ATM	Provinsi
					Layanan yang melaksanakan PME Malaria	Jumlah layanan yang melaksanakan PME Malaria	0	15	3,308,800,000	9	1,613,600	5	976,600,000	3	666,183,000	2			22	4,953,196,600	Balai PP ATM	22 Kab/Kota
					Workshop Tatalaksana Pengobatan Malaria	Jumlah peserta Workshop Pengobatan Malaria	200	150	757,900,000	7	967,650,000	5	417,500,000	5	417,500,000	3	315,220,000	29	2,875,770,000	Balai PP ATM	10 Kab/Kota	
					Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal)	Jumlah peserta Workshop Elektronik Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal)	250	50	2,294,560,000	9	684,580,000	4	414,510,000	4	414,510,000	2			29	3,808,160,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota
					Pembinaan Teknis Program Malaria ke kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan Pembinaan Teknis Program Malaria	0	29	2,451,400,000	7	4,372,500,000	5	2,285,870,000	5	2,285,870,000	5			29	11,395,640,000	Balai PP ATM	29 Kab/Kota
					Pertemuan Evaluasi Program Malaria	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Program Malaria	70	70	212,290,000	5	720,650,000	5	720,650,000	3	298,880,000	2	221,420,000	22	2,173,890,000	Balai PP ATM	22 Kab/Kota	
				Program	Pengadaan Media KIE Eliminasi Malaria	Jumlah pengadaan Media KIE Eliminasi Malaria	0	1	245,598,647			7	245,598,647					14	491,197,294	Balai PP ATM	Provinsi	
					Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan	1	2		3		4		5		6		6			Bidang P2P	



					yang melaksanakan Posbindu																	
		Kegiatan	Asistensi KTR tingkat Kab/kota	Jumlah Kab/Kota yg dilakukan Assisten	7	5	100,000,000	5	155,000,000	4	124,000,000	4	124,000,000	4	124,000,000	29	627,000,000	Bidang P2P	29 Kab/Kota			
			Monitoring pelayanan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara	Jumlah Kab/Kota yang sudah jalan pelayanan Deteksi dini	0	6	300,000,000	6	350,000,000	6	400,000,000	6	450,000,000	5	500,000,000	29	2,000,000,000	Bidang P2P	29 Kab/Kota			
			Pemeriksaan/Deteksi Dini Faktor Risiko PTM tingkat Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang sudah dilakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM	2	3	300,000,000	3	350,000,000	3	400,000,000	3	450,000,000	3	500,000,000	17	2,000,000,000	Bidang P2P	17 Kab/Kota			
		Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Kumulatif Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA	15	30		45		60		75		90		90			Bidang P2P			
		Kegiatan	Bimbingan Teknis Keswa dan Napza di tingkat kab/kota	Jumlah Kab/kota yang sudah melaksanakan Pelayanan keswa	3	5	350,000,000	8	400,000,000	11	425,000,000	14	450,000,000	17	475,000,000	17	2,100,000,000	Bidang P2P	5 Wil Adat			
			Monitoring Keswa dan Napza di tingkat Kab/kota	Jumlah Puskesmas yang sudah melaksanakan Pelayanan keswa	15	30	350,000,000	45	400,000,000	60	425,000,000	75	450,000,000	90	475,000,000	120	2,100,000,000	Bidang P2P	5 Wil Adat			
		Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)		74		79		84		89		95		74			Bidang P2P			
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan DBD ≤ 49 per 100.000 Penduduk		8		11		14		17		19					Bidang P2P			



						Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)		20	21	23	24	26	28	29	29	2,749,490,000	Bidang P2P					
				Kegiatan		Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin		Jumlah Kab/Kota yang Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin		29	29	549,898,000	29	549,898,000	29	549,898,000	29	549,898,000	29	2,749,490,000	Bidang P2P	Provinsi
						Bimbingan Teknis dan Monitirng evaluasi pelaksanaan Imunisasi		Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Bimtek dan Monev		29	29	810,870,000	29	810,870,000	29	810,870,000	29	810,870,000	29	4,054,350,000	Bidang P2P	29 Kab/Kota
						Distribusi logistik untuk Imunisasi	Jumlah Kab/Kota yang Distribusi logistik untuk Imunisasi	29	29	652,340,000	29	652,340,000	29	652,340,000	29	652,340,000	29	652,340,000	29	3,261,700,000	Bidang P2P	29 Kab/Kota
						Pendampingan Pelaksanaan SOS	Jumlah Wil Adat yang dilakukan pendampingan pelaksanaan SOS	5	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	1,718,080,000	5	8,590,400,000	Bidang P2P	5 Wil Adat
				Program		Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Kabupaten/Kota dengan angka kesakitan DBD ≤ 49 per 100.000 Penduduk	6	8		11		14		17		19		19		Bidang P2P	
				Kegiatan		Peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan DBD	Jumlah petugas ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan DBD	0	40	358,726,000	28	471,526,000	25	320,700,000	25	320,700,000			118	1,471,652,000	Bidang P2P	Provinsi
						Investigasi KLB DBD	Jumlah Kejadian KLB di Kab/kota yang dilakukan investigasi	0	10	757,900,000	7	967,650,000	5	417,500,000	5	417,500,000	3	315,220,000	29	2,875,770,000	Bidang P2P	10 Kab/Kota



				Penangulangan fogging fokus sebelum musim penularan (SMP) Endemis, Sporadis dan Potensi KLB DBD	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Fogging SMP	0	7	2,451,400,000	7	4,372,500,000	5	2,285,870,000	5	2,285,870,000	5	2,285,870,000	5	2,285,870,000	29	11,395,640,000	Bidang P2P	29 Lokasi		
				Pengadaan logistik DBD untuk persiapan PON 2020	Jumlah Paket logistik DBD yang diadakan	0	7	245,598,647			7	245,598,647								14	491,197,294	Bidang P2P	Provinsi	
			Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		100		100		100		100		100		100					Bidang P2P		
					Jumlah Kab/Kota yang menangani KLB PD3I dan Penyakit Menular Lainnya < 24 Jam	29	29		29		29		29		29		29		29		29		Bidang P2P	
		Kegiatan		Surveilans PD3I dan Penyelidikan Epidemiologi	Jumlah Kab/Kota yang menangani KLB PD3I dan Penyakit Menular Lainnya < 24 Jam	29	17	116,000,000	20	116,000,000	20	116,000,000	20	116,000,000	20	116,000,000	20	116,000,000	29	580,000,000	Bidang P2P	29 Kab/Kota		
				Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini	Jumlah Kab/Kota yang mampu memverifikasi sinyal kewaspadaan dini potensi KLB dan Kelengkapan dan Ketepatan Laporan SKDR	29	29	62,650,000	29	62,650,000	29	62,650,000	29	62,650,000	29	62,650,000	29	62,650,000	29	313,250,000	Bidang P2P	29 Kab/Kota		
	S 4 Meningkat nya		Program	Pengiriman Spesimen KLB ke Lab Surabaya	Jumlah pengiriman spesimen KLB	10	10	11,000,000	10	11,000,000	10	11,000,000	10	11,000,000	10	11,000,000	10	11,000,000	50	55,000,000	Bidang P2P	Provinsi		
			Program	Sumberdaya Kesehatan	?????																	Bidang SDK		



	Sumberdaya Kesehatan	Kegiatan	Pembinaan Organisasi Profesi Bidang kesehatan	Jumlah OP yang melaksanakan seminar untuk pencapaian target SKP	16	16	242,000,000	16	380,000,000	19	380,000,000	19	380,000,000	19	380,000,000	100	1,717,000,000	Bidang SDK	
					29	-	-	5	400,000,000	29	400,000,000	29	400,000,000	29	400,000,000	29	1,200,000,000	Bidang SDK	Dinkes provinsi
					29	0	0	0	0	29	400,000,000	29	400,000,000	29	400,000,000	29	1,200,000,000	Bidang SDK	
	Program	Koordinasi Teknis Program SDK	Jumlah dokumen deskripsi SDM Kesehatan	Jumlah Laporan Monev	29	83	428,000,000	83	520,000,000	111	520,000,000	111	520,000,000	111	650,000,000	111	2,200,000,000	Bidang SDK	
					-	40	95,395,000	50	104,935,000	60	115,428,000	70	126,971,000	80	139,668,000	100	139,668,000	Bidang SDK	Provinsi
					-	25	266,800,000	35	293,480,000	45	322,828,000	55	355,115,000	65	390,625,000	100	390,625,000	Bidang SDK	Provinsi
		Kegiatan	Monitoring Alkes di Sarana Apotik & Toko Alkes	Jumlah Laporan Monev	40	50	21,600,000	60	23,760,000	70	26,136,000	80	28,749,000	90	31,625,000	100	31,625,000	Bidang SDK	Provinsi
					80	82		85		86		90		92		95		Bidang SDK	
					1	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	5	750,000,000	Bidang SDK	Provinsi
					1	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	5	1,000,000,000	Bidang SDK	Provinsi



				Pengadaan Logistik Non OAT	Jumlah paket/jenis logistik OAT	1	1	959,540,500	1	518,045,000	1	1,006,635,500	1	569,849,500	1	1,107,300,000	5	1,107,300,000	Bidang SDK	Provinsi
				Pengadaan Logistik / Reagen IMS / HIV	Jumlah paket/jenis logistik OAT	1	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	5	1,000,000,000	Bidang SDK	Provinsi
				Pengadaan Reagen Viral Load	Jumlah paket/jenis reagen Viral Load	1	1	3,750,000,000	1	3,750,000,000	1	3,750,000,000	1	3,750,000,000	1	3,750,000,000	5	3,750,000,000	Bidang SDK	Provinsi
				Pengadaan Logistik / RDT Malaria	Jumlah paket/jenis logistik RDT Malaria	1	1	2,749,680,000	1	1,972,000,000	1	1,972,000,000	1	1,972,000,000	1	1,972,000,000	5	1,972,000,000	Bidang SDK	Provinsi
				Penyediaan Dana Distribusi Obat,Vaksin dan Reagen dari Instalasi Farmasi Provinsi Ke IFK dan RS	Jumlah kabupaten/kota yang menerima distribusi obat dan vaksin	29	29	2,700,000,000	29	2,500,000,000	29	2,400,000,000	1	2,400,000,000	29	2,400,000,000	29	2,400,000,000	Bidang SDK	Provinsi
				Peningkatan sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana		5	297,500,000	5	150,000,000	5	297,500,000	5	150,000,000	5	297,500,000	25	297,500,000	Bidang SDK	Provinsi
				Pelatihan Pengelolaan obat sesuai standar bagi Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kab/kota	Jumlah tenaga Pengelola Obat yang dilatih	72	73	118,800,000	75	118,800,000	77	118,800,000	79	118,800,000	80	118,800,000	80	118,800,000	Bidang SDK	Provinsi
				Pelatihan Pengelolaan Obat sesuai standar bagi Pengelola Obat / Instalasi Farmasi Rumah Sakit Baru	Jumlah tenaga farmasi RS yang dilatih		29	67,800,000	29	67,800,000	29	67,800,000	29	67,800,000	29	67,800,000	145	67,800,000	Bidang SDK	Provinsi
				Monitoring Pemanfaatan Buffer Stock di IFK dan Rumah Sakit	Jumlah laporan pemanfaatan obat buffer stok		29	360,750,000	29	360,750,000	29	360,750,000	29	360,750,000	29	360,750,000	29	360,750,000	Bidang SDK	Provinsi



				Program	Sumberdaya Kesehatan	Percentase Pelaksanaan Diklat sesuai standart		75		80		100		100		100		100		100		UPT Balatkes	Provinsi					
				Pelaksanaan akreditasi -reakreditasi Balai Latihan Tenaga Kesehatan	Presentase kemajuan sertifikat akreditasi balatkes	70	100	210,000,000	-	-	-	-	-	-	100	250,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000	Balatkes	Provinsi				
				Pelatihan analisis kebutuhan diklat di lima regional papua	Jumlah tenaga analis kebutuhan Diklat	0	29	350,000,000	29	360,000,000	29	370,000,000	29	380,000,000	29	390,000,000	145	1,850,000,000	145	1,850,000,000	145	1,850,000,000	145	1,850,000,000	UPT Balatkes	Provinsi		
				Pelatihan jabatan fungsional administratur kesehatan	Jumlah tenaga Jafung admin kes yang dilatih	25	29	350,000,000	29	360,000,000	29	370,000,000	29	380,000,000	29	390,000,000	145	1,850,000,000	145	1,850,000,000	145	1,850,000,000	145	1,850,000,000	Balatkes	Provinsi		
				Pelatihan analisis kebutuhan diklat di lima regional papua	Jumlah tenaga analisis kebutuhan diklat di 5 region	30	30	375,000,000	30	375,000,000	30	375,000,000	30	375,000,000	30	375,000,000	150	1,875,000,000	150	1,875,000,000	150	1,875,000,000	150	1,875,000,000	UPT Balatkes	Provinsi		
				Peningkatan kapasitas widyaiswara	Jumlah tenaga WI yang mengikuti pelatihan	6	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	0	0	0	30,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	UPT Balatkes	Provinsi
				Pelatihan training neet assessment	Jumlah pegawai yang dilatih TNA	12	4	150,102,000	4	150,102,000	4	150,102,000	4	150,102,000	4	150,102,000	16	750,510,000	16	750,510,000	16	750,510,000	16	750,510,000	UPT Balatkes	Provinsi		
				Pelatihan master of trainer (MOT)	Jumlah peserta mengikuti pelatihan MOT	30	30	416,882,000	30	416,882,000	30	416,882,000	30	416,882,000	30	416,882,000	150	2,084,410,000	150	2,084,410,000	150	2,084,410,000	150	2,084,410,000	UPT Balatkes	Provinsi		
				Pelatihan BTLS Mendukung PON 2020	Jumlah peserta diklat BTLS	30	30	516,000,000	30	516,000,000	30	516,000,000	30	516,000,000	30	516,000,000	150	2,580,000,000	150	2,580,000,000	150	2,580,000,000	150	2,580,000,000	UPT Balatkes	Provinsi		
				Pelatihan ATLS Mendukung PON 2020	Jumlah peserta diklat ATLS	30	30	516,000,000	30	516,000,000	30	516,000,000	30	516,000,000	30	516,000,000	150	2,580,000,000	150	2,580,000,000	150	2,580,000,000	150	2,580,000,000	UPT Balatkes	Provinsi		
				Pelatihan TOT .Bagi penyelenggara Diklat di 5 Regional Wilayah	Jumlah Pelatihan TOT di 5 regional Papua	30	30	400,000,000	30	400,000,000	30	400,000,000	30	400,000,000	30	400,000,000	150	2,000,000,000	150	2,000,000,000	150	2,000,000,000	150	2,000,000,000	UPT Balatkes	Provinsi		



				Adat Papua																
				Penyediaan Sarana IT bagi peserta Diklat	Tersediannya Sarana IT bagi peserta Diklat	20	250	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	5	1,250,000,000	Balatkes	Provinsi
				Peningkatan kapasitas ASN Blatkes	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	30	10	175,000,000	10	175,000,000	10	175,000,000	10	175,000,000	10	175,000,000	30	875,000,000	UPT Balatkes	Provinsi
			Program	Sumberdaya Kesehatan	Persentase pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		UPT SMK Kesehatan	Provinsi
		Kegiatan		Pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan	Persentase pengelolaan SMK Kesehatan	100	100	689,400,000.00	100	1,129,875,000.00	100	1,148,595,000.00	100	1,148,595,000.00	100	619,500,000.00	1	619,500,000.00	UPT SMK Kesehatan	Provinsi
				Pengadaan Bahan Pemeriksaan Laboratorium untuk praktek siswa	Jumlah paket/jenis bahan kimia /reagen		1	500,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	UPT SMK Kesehatan	Provinsi
				Pengadaan Alat Laboratorium SMK Kesehatan	Jumlah/Jenis paket alat (keg)	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	700,000,000	100%	700,000,000	UPT SMK Kesehatan	Provinsi
				Peningkatan kapasitas pengelolah dan guru SMK Kesehatan	Jumlah peserta diklat/magang	10	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	300,000,000.00	15	350,000,000.00	10	350,000,000.00	10	350,000,000.00	UPT SMK Kesehatan	Provinsi
				Pembangunan Gedung SMK Kesehatan	Terwujudnya gedung SMK lantai 2	1	1	12,000,000,000.00	1	12,000,000,000.00	1	12,000,000,000.00	1	12,000,000,000.00	1	12,000,000,000.00	1	10,000,000,000.00	UPT SMK Kesehatan	Provinsi



Misi : Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu

Sasaran : Meningkatkan pemerataan pembangunan

Tujuan : Menigkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan menjadi halaman depan Negara

	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Tertentu		Program	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pustikesmas di daerah perbatasan													Bidang Yanes		
								100		100		100		100		100			
		Program	Sumberdaya Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)													Bidang SDK		
		Kegiatan	Pemberdayaan SDM Kesehatan Sebagai Tenaga Kontrak	SDM Kesehatan yang di Kontrak ditugaskan di daerah terpencil	20	96	8,000,000,000	96	15,000,000	96	20,000,000	96	20,000,000	96	25,000,000	480	252,000,000,000	Bidang SDK	
						13	15			17		19		21		23			
		Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk													Bidang P2P	5 Wil Adat	



	Kegiatan	Pencegahan penularan penyakit endemik (Kusta)	Jumlah DT3 yang dilaksanakan Layanan Pemberantasan Penyakit Kusta	5	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	12,500,000,000	Bidang P2P	5 Wil Adat
	Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Percentase Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria	5	8		11		13		15		16		18	Bidang P2P
	Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Wil Adat yang dilaksanakan Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	5	5		5		5		5		5		5	Bidang P2P
	Kegiatan	Pencegahan dan penanggulangan endemik filaria (Kaki Gajah) (Sosialisasi dan Advokasi, Pendataan penduduk sasaran, pelaksanaan dan sweeping POPM filariasis)	Jumlah Kab/Kota dilakukan Sosialisasi dan Advokasi POPM Filariasis	4			4	235,735,000	3	169,754,000	2	152,000,000			13	557,489,000
			Jumlah Distrik dilakukan Sosialisasi POPM Filariasis untuk Peningkatan Minum Obat Filariasis	50	60	771,703,000	50	725,029,000	50	725,029,000	50	725,029,000			260	2,946,790,000
		Peningkatan Kapasitas dalam Perawatan Penderita Filariasis/ Kaki Gajah	Jumlah Petugas yang ditingkatkan Kapasitas dalam Perawatan	0			13	452,727,000	10	364,599,000	10	364,599,000			33	1,181,925,000
																Provinsi



			Penderita Filariasis/ Kaki Gajah																
		Pertemuan Monitoring Evaluasi P2 Filariasis dan Kecacingan	Jumlah Peserta Pertemuan Monitoring Evaluasi P2 Filariasis dan Kecacingan	0			87	647,512,000	87	647,512,000	87	647,512,000	87	647,512,000	261	2,590,048,000	Bidang P2P	Provinsi	
		Peningkatan Kapasitas Untuk Pemeriksaan Kecacingan	Jumlah Petugas yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemeriksaan Kecacingan melalui laboratorium	0			88	717,111,000	68	570,231,000					156	1,287,342,000	Bidang P2P	Provinsi	
	Program	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Wil Adat yang dilaksanakan Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	5	5		5		5		5		5		5			Bidang P2P	
	Kegiatan	Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Jumlah Wil Adat yang dilaksanakan Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	5	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	2,500,000,000	Bidang P2P	5 Wil Adat	
	Program	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi		100		100		100		100		100		100			Bidang P2P	



				bencana provinsi															
		Kegiatan	Penanggulangan bencana bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi	Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi		5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	5	2,000,000,000	25	10,000,000,000	Bidang P2P	25 lokasi
S 6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)		84		84		86		86		90		90		Sekretariat	
		Program	Pengembangan data dan informasi kesehatan	Cakupan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota (%)	32	32		40		45		50		60		60		Sekretariat	
				Bank Data Kesehatan Prov. Papua		1		1		1				1		1			
		Kegiatan	Bimbingan Teknis Pengelolaan data dan informasi	Laporan Data dan Informasi	20	20	610,000,000	20	610,000,000	20	610,000,000	20	610,000,000	20	610,000,000	20	3,050,000,000.00	Sekretariat	20 Kab/Kota
			Forum kelompok kerja Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Forum Pokja SIK				1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,200,000,000.00	Sekretariat	Provinsi
			Pendampingan penyusunan profil kesehatan di 5 Wilayah Adat	Jumlah Profil Kesehatan Kab.	1	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	25	1,250,000,000.00	Sekretariat	Provinsi
			Pengadaan Sarana Sistem Informasi Kesehatan (hardware)	Jumlah Sarana SIK		10	250,000,000	10	300,000,000	10	350,000,000	10	400,000,000	10	500,000,000	50	1,800,000,000.00	Sekretariat	Provinsi



			dan softwere)																	
			Pengelolaan website Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Kesinambungan informasi publik	12	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	1,250,000,000.00	Sekretariat	Provinsi	
			Pembuatan Aplikasi softwere data base dan pelaporan	Jumlah Aplikasi softwere	5			1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	1,000,000,000.00	Sekretariat	Provinsi	
		Program	Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Percentase dokumen perencanaan	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Provinsi	
		Kegiatan	Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Provinsi Papua	Jumlah peserta pertemuan Kab/kota dan RS	200	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	1000	6,000,000,000.00	Sekretariat	Provinsi	
			Pendampingan perencanaan pada daerah bermasalah kesehatan	Jumlah Daerah Bermasalah yang didampingi .	15	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	3,000,000,000.00	Sekretariat	15 Kabupaten	
			Peningkatan kapasitas aparatur perencana	Jumlah aparatur	15					20	450,000,000					20	450,000,000.00	Sekretariat	Surabaya	
			Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan	Jumlah Laporan monev	12	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	60	1,250,000,000.00	Sekretariat	Provinsi	
			Evaluasi dan Review Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Jumlah Dokumen						2	200,000,000				2	200,000,000	4	400,000,000	Sekretariat	Provinsi
		Program	Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan	Percentase kemitraan	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Provinsi	
		Kegiatan	Pengelolaan mitra Pembangunan Kesehatan	Jumlah mitra lembaga kemitraan	18	18	305,000.00	18	305,000.00	18	305,000.00	18	305,000.00	18	305,000.00	18	1,525,000	Sekretariat	Provinsi	
		Program	Pelayanan Administrasi	Percentase pengelolaan	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Provinsi	



		Perkantoran	perkantoran															
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat.	5,500	5,500	93,406,200	5,500	93,406,200	5,500	93,406,200	5,500	93,406,200	5,500	93,406,200	27,500	467,031,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening	12	12	1,310,660,000	12	1,310,660,000	12	1,310,660,000	12	1,310,660,000	12	1,310,660,000	60	6,553,300,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit	17	17	1,072,600,000	17	1,072,600,000	17	1,072,600,000	17	1,072,600,000	17	1,072,600,000	85	5,363,000,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit	45	45	19,500,000	45	19,500,000	45	19,500,000	45	19,500,000	45	19,500,000	225	97,500,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan	12	12	1,806,720,000.00	12	1,806,720,000	12	1,806,720,000	12	1,806,720,000	12	1,806,720,000	60	9,033,600,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	12	12	13,800,000	12	13,800,000	12	13,800,000	12	13,800,000	12	13,800,000	60	69,000,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah sub unit kerja	27	27	422,500,000	27	422,500,000	27	422,500,000	27	422,500,000	27	422,500,000	135	2,112,500,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan	12	12	846,620,000	12	846,620,000	12	846,620,000	12	846,620,000	12	846,620,000	60	4,233,100,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan	20	20	256,520,000	20	256,520,000	20	256,520,000	20	256,520,000	20	256,520,000	100	1,282,600,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kerja	12	12	488,399,800	12	493,399,800	12	498,399,800	12	498,399,800	12	498,399,800	60	2,476,999,000	Sekretariat, SMK	Provinsi
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan kerja	12	12	854,000,000	12	854,000,000	12	854,000,000	12	854,000,000	12	854,000,000	60	4,270,000,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah bulan kerja	12	12	861,840,000	12	861,840,000	12	861,840,000	12	861,840,000	12	861,840,000	60	4,309,200,000	Sekretariat	Provinsi
	Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarpras	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Provinsi
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan	1	1	20,547,000,000	1	20,200,000,000	1	20,200,000,000	1	20,200,000,000	1	20,200,000,000	5	101,347,000,000	Sekretariat	Provinsi



		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit alat	50	50	648,164,000	50	648,164,000	50	648,164,000	50	648,164,000	50	648,164,000	250	648,164,000	Sekretariat	Provinsi
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	12	12	63,800,000	12	63,800,000	12	63,800,000	12	83,800,000	12	83,800,000	60	359,000,000	Sekretariat, SMK	Provinsi
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan	45	45	1,317,770,000	45	1,317,770,000	45	1,317,770,000	45	1,317,770,000	45	1,317,770,000	45	6,588,850,000	Sekretariat	Provinsi
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor	3	3	3,657,025,000	3	2,600,025,000	3	2,600,025,000	3	2,600,025,000	3	2,600,025,000	3	14,057,125,000	Sekretariat	Provinsi
		Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	1,300,000,000	SMK	Provinsi
	Program	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Provinsi
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas aparatur (stel)	364	364	360,000,000	364	707,000,000	364	707,000,000	364	707,000,000	364	707,000,000	1820	3,188,000,000	Sekretariat	Provinsi
	Program	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase diklat aparatur	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat	
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan formal	100	20	866,000,000		866,000,000	20	866,000,000	20	866,000,000	20	866,000,000	100	4,330,000,000	Sekretariat	Jakarta, Surabaya, Yogyakarta
		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan non formal	100	20	954,500,000		954,500,000	20	954,500,000	20	954,500,000	20	954,500,000	100	4,772,500,000	Sekretariat	Jakarta, Surabaya, Yogyakarta
		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan non formal	100	22	1,104,500,000		1,114,500,000	22	1,119,500,000	22	1,124,500,000	22	1,124,500,000	110	5,587,500,000	Sekretariat, SMK	Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Jayapura
	Program	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase pelaporan dan dokumen	100	100	257,500,000		257,500,000	100	257,500,000	100	257,500,000	100	257,500,000	100	257,500,000	Sekretariat	Provinsi



			kinerja dan keuangan																
		Kegiatan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan dan dokumen (LAKIP, LPPD dan TP2K)	3	3	51,500,000	3	51,500,000	3	51,500,000	3	51,500,000	3	51,500,000	15	257,500,000	Sekretariat	Provinsi
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan	2	2	51,500,000	2	51,500,000	2	51,500,000	2	51,500,000	2	51,500,000	10	257,500,000	Sekretariat	Provinsi
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan	12	12	51,500,000	12	51,500,000	12	51,500,000	12	51,500,000	12	51,500,000	12	257,500,000	Sekretariat	Provinsi
			Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3	3	103,000,000	3	103,000,000	3	103,000,000	3	103,000,000	3	103,000,000	15	515,000,000	Sekretariat	Provinsi



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang Mengacu Pada Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian kondisi awal Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-.....						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
I	Meningkatnya Akses Kualitas Pelayanan Kesehatan									
1	Persentase Distrik yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi	9	30.77	42.70	52.14	62.11	71.23	71.23		
2	Persentase Rumah Sakit a yang tersertifikasi Akreditasi	30	62.79	86.05	100	100	100	100		
3	Presentase Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua	40	44	48	53	58	64	64		
4	Persentase Kabupaten minimal 2 puskesmas melaksanakan pelayanan tradisional, alternatif dan komplementer	24	24	38	60	80	100	100		
5	Persentase error rate (tingkat kesalahan) terhadap hasil pemeriksaan laboratorium	20	18	12	10	8	5	5		



II		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	27	30	40	50	60	70	70
2	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	23	25	30	35	40	45	45
3	Cakupan Neonatus	23	25	30	35	40	45	45
4	Cakupan pelayanan anak balita	18	20	25	30	35	40	40
5	Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (stunting)	29	27	26	25	24	23	23
6	Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih	40	43.5	47.5	51.5	55.5	60	60
7	Cakupan (%) keluarga akses terhadap sanitasi	18	20	22	24	27	30	30
8	Cakupan (%) PHBS	30	35	37.5	40	42.5	45	45
9	Cakupan (%) Poyandu Aktif	70	72	78	80	85	87	87
III		Menurunnya Angka Kesakitan						
1	Prosentase Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	13.8	13.8	27.6	41.4	55.2	69	69
2	Prosentase ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	12.8	12.8	17.2	21.9	26.9	32.2	32.2
3	Prosentase pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	73	75	80	85	90	95	95
4	Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu	2	2	3	4	5	6	6
5	Prosentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA	7	7.6	11.4	15.2	19	22.8	12.8
6	Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	70	74	79	84	89	95	95
7	Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka Prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk	13.5	15	17	19	21	23	23



9	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria	7	8	11	13	16	18	18
IV	Meningkatnya Sumberdaya Kesehatan							
1	Percentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan)	35	38	51	54	77	90	90
2	Percentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin	80	82	85	87	90	92	92
3	Percentase Pelaksanaan Diklat sesuai standart	75	75	75	80	80	100	100
V	Meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah perbatasan, terbelakang,terdepan, terluar dan tertentu							
1	Percentase ketersediaan puskesmas di daerah perbatasan	80	80	90	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan, terbelakang terdepan, terluar dan tertentu	20	23	25	27	29	31	31
3	Percentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	100
VI	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan							
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	84	84	85	86	87	88	88



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018-2023 serta prioritas daerah bidang kesehatan yang akan dihadapi dalam waktu 5 (lima) tahun akan datang.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua dibidang/urusan kesehatan, selanjutnya Resntra Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja).

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Papua termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi unit bawahannya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra ini, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua.



Pada akhirnya diharapkan melalui Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 ini dapat mencapai tujuan dan dapat memberi kontribusi nyata bagi pencapaian RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN